RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT

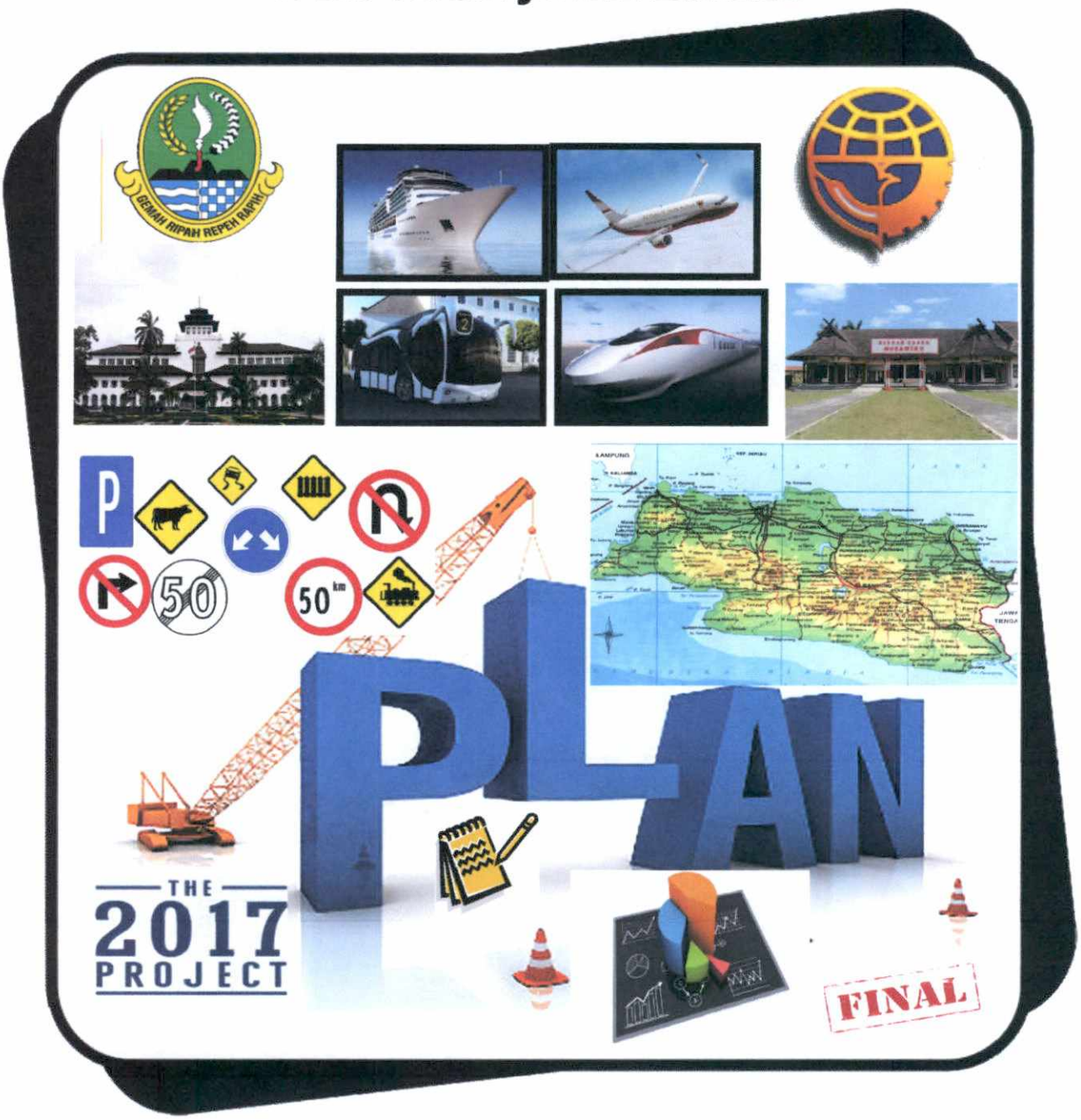

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Sukabumi No. 1 Tlp. : (022) 7207257 – 7272258 Fax : (022) 7202163
Website : www.dishub.jabarov.go.id – e-mail : dishub@jabarprov. go.id
Bandung - 40271

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Sukabumi No. 1, Telp : (022) 7207257 – 7272258 Fax: (022) 7202163
Website: www.dishub.jabarprov.go.id, email: dishub@jabarprov.go.id
BANDUNG 40271

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 188.4 / 685 / Sekre

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :

a. bahwa amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. bahwa sebagai implementasi dari kedudukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang merupakan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus mendasarkan pula kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 serta sebagai bahan pedoman perencanaan tahunan di bidang perhubungan;

d. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Pergeseran Kementerian Negara/ Lembaga;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Tranportasi Nasional (SISTRANAS);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi;
11. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2010 tentang tugas pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 79 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan Kebijakan Nasional;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
17. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
18. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 188.4/189/Sekre tanggal 24 Februari 2015 tentang Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017**

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di atas, selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang merupakan rencana satu tahun kedepan untuk mendukung tercapainya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Perhubungan merupakan rencana kerja yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Kondisi Umum Daerah didalamnya termasuk transportasi, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2017.

KEEMPAT : Isi dan uraian Renja Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga di atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 Juni 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671011 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Inspektur Provinsi Jawa Barat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, telah dapat diselesaikan.

Rencana kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Sebagaimana diketahui penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 disusun dalam suasana dan kondisi akan diberlakukannya Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik secara organisasi maupun secara penganggaran. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 memerlukan konsentrasi, konsultasi, koordinasi dengan semua pihak terkait, serta kesinambungan program / kegiatan dalam pencapaian RPJMD 2013-2018 dan Dokumen Perencanaan lainnya.

Penyusunan Rencana kerja ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, sehingga target penetapan RKA/DPA- SKPD Tahun 2017 dapat

dipenuhi sesuai jadwal yang disepakati antara pihak Gubernur Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, mengingat banyak kendala dan keterbatasan dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, atas segala kekurangsempurnaan dalam penyusunan naskah ini mohon kiranya dimaafkan dan mengharapkan adanya tanggapan, saran dan umpan balik yang konstruktif, sehingga segala kekurangan dalam penyusunan naskah rencana kerja tahun berikutnya dapat lebih baik.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian rencana kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugerah dan hidayah-Nya.

Akhirulkalam, mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandung, 9 juni 2016 .

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Dr. H. DEDI TAUFIK, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671011 199303 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN I – 1
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Landasan Hukum ..... I – 11
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I – 14
1.4. Sistematika Penulisan ..... I – 14

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU II – 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD ..... II – 1
2.1.1 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah Antisipatif ..... II – 26
2.1.2 Strategi Pemecahan Masalah ..... II – 33
2.1.3 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan ..... II – 34
2.1.4 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan ..... II – 38
2.2. Analisis Kinerja pelayanan OPD ..... II – 43
2.2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan ..... II – 43
2.2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan ..... II – 54
2.2.3 Alokasi dan realisasi Anggaran ..... II – 55
2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..... II – 61
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II – 65
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... II – 69

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III – 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III – 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD ..... III – 7
3.3. Program dan Kegiatan ..... III –10

Bab IV PENUTUP IV – 1

Lampiran-Lampiran
1. **Formulir J-1**
2. **Formulir J-2**
3. **Formulir J-3**
4. **Formulir J-4**

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Dokumen perencanaan nasional ini akan dipergunakan sebagai pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh pemerintahan yang terpilih pada Pemilihan Umum 2014. Sejalan dengan itu, memperhatikan amanat RPJMN 2015-2019, Kementerian Perhubungan menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP.430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

Dalam RPJMN 2015-2019 terdapat agenda nasional antara lain Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional yang disusun dalam 11 sub agenda prioritas diantaranya (1) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; (2) Membangun Transportasi Massal Perkotaan; (3) Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah :

a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda;
b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global;
c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
d. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana

transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrem;

e. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya;

Dari sub agenda nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi yang terkait langsung sektor transportasi antara lain :

a) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
c) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
e) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
f) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan

Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan menjadi salah satu sub agenda prioritas Nasional dengan sasaran (1) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan (2) Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan perkotaan yang diukur dengan kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar minimal 20 km/ jam (3) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013, dan sesuai Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa

Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 tanggal 6 Januari 2014 serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 188.4/020.A/KD-Sekre/2014 tanggal 10 Januari 2014, tahun 2017 memasuki tahun ke 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah bidang Perhubungan. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih akan memerlukan waktu untuk mengakselerasi tahapan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan perhubungan di daerah, karena masih memerlukan penyesuaian-penyesuaian tugas pokok dan fungsi sebagai dampak penyesuaian urusan / kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, yang memasukkan urusan perhubungan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada butir 7, a. disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota harus menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/ susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. Hasil inventarisasi tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota T.A. 2017. Dengan demikian tahun 2017 harus telah mengimplementasikan UU. No. 23 Tahun 2014 baik dari sisi urusan, organisasi dan penganggarannya. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 memerlukan konsentrasi, konsultasi, koordinasi dengan semua pihak terkait, serta kesinambungan program / kegiatan dalam pencapaian RPJMD 2013-2018, RPJPD dan Dokumen Perencanaan lainnya.

Menyelesaikan inventarisasi P3D antar tingkatan/ susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) lebih cepat dari waktu yang

telah ditentukan, akan membantu proses perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2017 lebih cermat, lengkap dan terukur.

Salah satu tujuan penyelenggaraan perhubungan sesuai amanat Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan adalah mewujudkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat yaitu untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Jawa Barat.

Tujuan untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Jawa Barat tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersedian sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi) atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta hasil evaluasi pembangunan tahun yang lalu. RKPD tersebut memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kebijakan pembangunan Jawa Barat pada Tahun 2017 tetap menekankan pada terlaksanaan sinergitas antara perencanaan pusat dan daerah serta mempedomani prinsip-prinsip pembangunan Jawa Barat 2005 – 2025 dan mengacu pada tahapan pembangunan Jawa Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2015 yang pada tahun 2013-2018 memasuki tahapan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dan tahapan pembangunan Jawa Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018.

Kebijakan tersebut di atas tetap menekankan peningkatan kualitas sarana prasarana dan pendidik serta pemerataan pelayanan pendidikan; peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan daya saing tenaga kerja dan industri serta peningkatan akses untuk pertumbuhan ekonomi daerah; peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah. Pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga masih menjadi penekanan di Tahun 2017, dengan tetap menterjemahkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 dan Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025 dan perwujudan janji kampanye Gubernur Jawa Barat serta pencapaian Indikator RPJMD Tahun 2013 – 2018 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Berkaitan dengan perencanaan tahunan kabupaten/kota, RKPD Provinsi merupakan pedoman atau acuan untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 272 dan 273 yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, selanjutnya Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud,

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Lebih jelas disebutkan dalam pasal 273 UU. No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, selanjutnya Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dalam pasal 276 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Dan kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan Kebijakan Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa setiap OPD / Biro diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini telah mengikuti Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD/Biro Setda Provinsi Jawa Barat dan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 pada Lampiran VII Pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD/ Biro Setda Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :

1) OPD menyusun Renja OPD.
2) Rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
3) Rancangan Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

a. Pendekatan politik, yang merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan Gubernur;
b. Pendekatan teknokratik, yang dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berfikir ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;
c. Pendekatan partisipatif, yang dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) terhadap pembangunan;
d. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*); yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan antara Kementerian/Lembaga dengan OPD melalui Forum OPD dan Forum Gabungan OPD, dan;
e. Pendekatan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan antara OPD dengan OPD Kabupaten/Kota melalui Forum OPD dan Forum Gabungan OPD.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan lampiran VII Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Gubernur nomor 050/51/Bapp tanggal 30 November 2015 tentang Jadwal Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017. Renja disusun melalui 4 (empat) tahapan, yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, yakni :

a. Tahap Pertama : Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut :

   1) OPD menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Kepala Bppeda Provinsi Jawa Barat;

   2) Kepala OPD membentuk tim penyusun Renja OPD;

   3) Tim Penyusun Renja OPD menyiapakan bahan-bahan penyusunan rancangan awal Renja OPD, dengan memperhatikan :

      a) Program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra OPD pada tahun rencana;

      b) Rancangan awal RKPD.

      c) Renja K/L untuk penyusunan Renja OPD provinsi;

      d) Renja OPD provinsi untuk penyusunan kegiatan pada Renja OPD kabupaten dan kota.

   4) Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.

   5) Melaksanakan penyusunan rancangan awal Renja OPD, yang berisi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksankan pada tahun rencana, berdasarkan rancangan awal RKPD, Renstra OPD serta memperhatikan tupoksi OPD dan alokasi anggaran indikatif:

      a) Bagi pemerintah kabupaten dan kota, memperhatikan hasil musrenbang kecamatan dan rancangan awal RKPD;

b) Bagi pemrintah provinsi, memperhatikan hasil musrenbang kabupaten dan kota, rancangan Renja KL, dan rancangan awal RKPD.

6) Menyiapkan forum OPD dan atau forum gabungan OPD.

7) Menyampaikan rancangan Renja OPD kepada Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum OPD dan atau forum gabungan OPD.

b. Tahap Kedua : Penyelenggaraan Forum OPD dan atau Forum Gabungan OPD

c. Tahap Ketiga : Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD

1) Menyusun rancangan akhir Renja OPD dengan memperhatikan hasil-hasil dari Forum OPD dan atau Forum Gabungan OPD;

2) Kepala OPD menyampaikan rancangan akhir Renja OPD kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;

3) Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja OPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD;

4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja OPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala Daerah dalam rangka memperoleh pengesahan.

d. Tahap Keempat : Penetapan Peraturan Kepala OPD tentang Renja OPD

Langkah – Langkah dalam tahapan keempat mengenai penetapan peraturan kepala OPD tentang Renja OPD adalah sebagai berikut:

1) Menyempurnakan rancangan akhir Renja OPD sesuai hasil verifikasi oleh Bappeda;

2) Pengesahan rancangan akhir Renja OPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.

3) Penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja OPD disahkan oleh Kepala Daerah.

Melalui forum OPD baik Provinsi atau Kabupaten / Kota yang telah diselenggarakan dan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 2016, diharapkan dapat :

- Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/ kota;
- Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan OPD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD provinsi.

Hasil pelaksanaan forum OPD baik Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah diselenggarakan dan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut:

- Rancangan awal Renja OPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran OPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan dalam forum OPD dan atau forum gabungan OPD;
- Daftar prioritas program dan kegiatan menurut sumber pendanaan (APBD Provinsi dan APBN/BLN) yang disusun menurut Kabupaten/ Kota yang dituangkan dalam formulir B-4. Selanjutnya, prioritas program dan kegiatan tersebut diinformasikan kepada masing-masing kabupaten/ kota oleh delegasi kabupaten/ kota;
- Berita acara hasil forum OPD Provinsi

Sebagai gambaran berikut alur penyusunan Renja SKPD / OPD Provinsi:

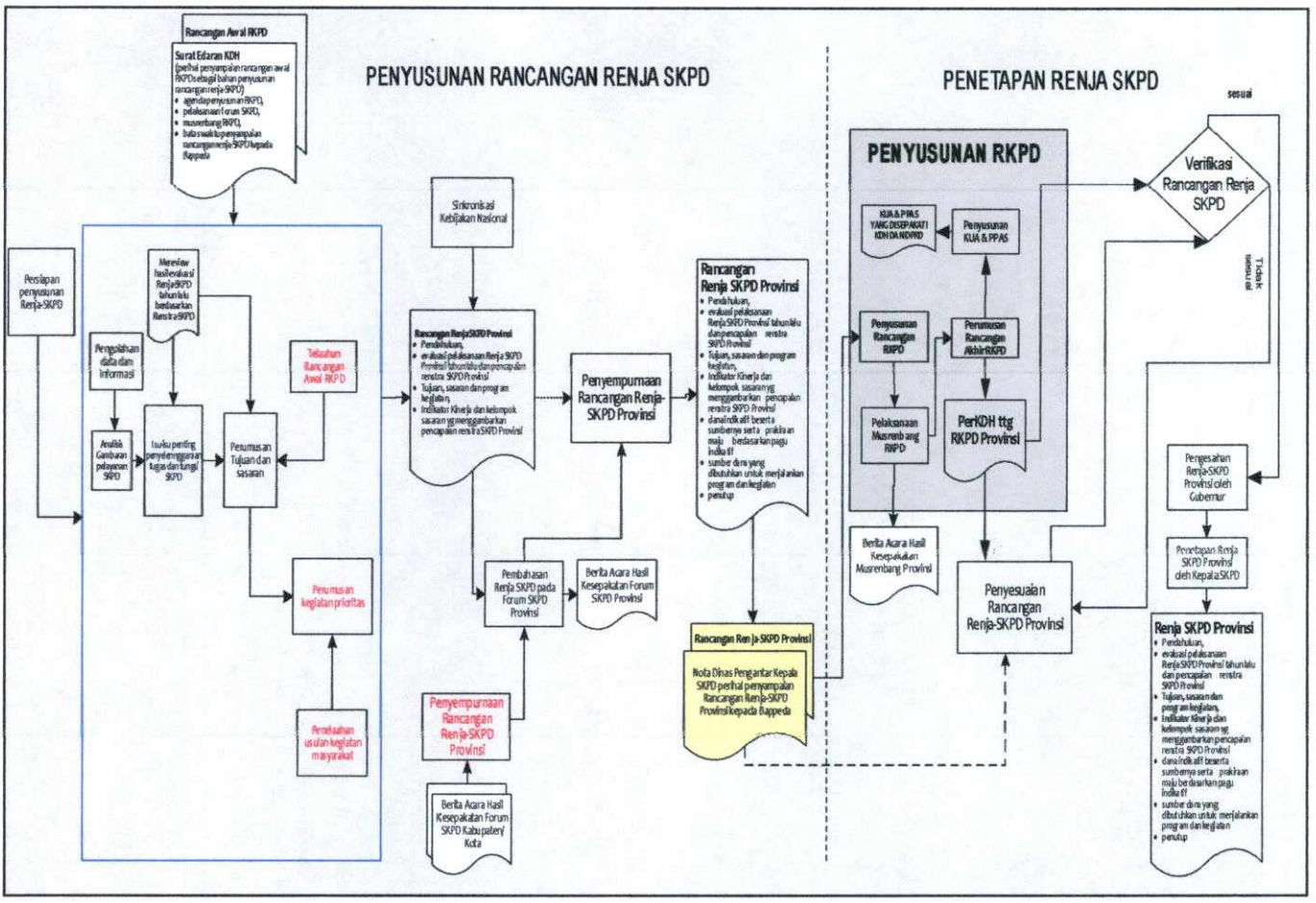

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran VI

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusun Renja OPD/ SKPD Provins

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2015-2019;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15) Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP.43 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019;
16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi;
17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018;
25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat;
26) Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tanggal 6 Januari 2014;
27) Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
28) Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan Kebijakan Nasional;
29) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

30) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 188.4/020.A/KD-Sekre/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018;
31) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 188.4/189/Sekre tanggal 24 Februari 2015 tentang Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah untuk memberikan pedoman kerja tahun 2017 bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait, sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah :

a. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Perhubungan yang mendorong terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Jawa Barat;
b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan Perhubungan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalaian dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
e. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 berpedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, yang mengimplementasikan perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja OPD, Proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan trentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2015 dan Capaian Renstra OPD 2003-2018

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD atau SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fuingsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap OPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, , perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota, dilengkapi dengan tabel usulan program/ kegiatan para pemangku kepentingan (bila sudah dilakukan)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Tahun 2017

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Menjelaskan program dan kegiatan OPD pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana (untuk kabupaten dan kota : APBD kabupaten dan kota, APBD Provinsi dan APBN/HPLN; untuk provinsi : APBD provinsi dan APBN/HPLN), Penyajian pada sub bab ini dapat melampirkan tabel perumusan program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan uraian penutup, berupa :

- Kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja Dinas Perhubungan;
- Penegasan komitmen Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan RPJMD;
- Penegasan Renja Dinas Perhubungan sebagai acuan penyusunan RKA Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tahun rencana;
- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

Lampiran-Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2015 dan Capaian Renstra OPD 2013-2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

Namun sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Propinsi Jabar Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D), hingga tahun 2014 pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang perhubungan baru berdasarkan asas otonomi atau asas desentralisasi, kedua asas yang lain yaitu asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum terlaksanakan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah bidang Perhubungan. Bahkan sejak Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok bidang Perhubungan yang lama, sampai dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, kedua asas yaitu asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum terimplementasi dengan optimal.

Tahun 2014 kembali penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 sekaligus telah dimuat dalam lampiranya berupa pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dari sisi waktu, tentu tidak memerlukan untuk menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan sebagai turunan dari UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana UU Pemerintahan Daerah yang terdahulu. Namun dalam pelaksanaan belum dapat langsung terimplementasi, walaupun sesuai amanat UU 23 Tahun 2014, bahwa UU No. 32 Tahun 2004 telah dinyatakan dicabut, tetapi peraturan dibawahnya yang berkaitan

dengan pembagian urusan, tugas pokok dan fungsi, serta kelembagaan/ organisasi di Daerah masih perlu waktu untuk menyesuaikan sehingga dapat menjadi landasan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi setiap OPD. Untuk itu diperlukan kebijakan transisi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan tidak boleh ada kokosongan hukum.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015, telah disusun dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada tahun 2014 (n-1). Dalam perjalanannya telah dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2015 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2015.

Pada akhir tahun 2014 sampai awal tahun 2015 telah dilaksanakan review Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta terdapat 7 (OPD) awal yang direview termasuk Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dalam dua kali pertemuan telah dihasilkan penyempurnaan indikator kinerja sehingga Renstra, RKT, IKU telah juga dilaksanakan review sebagai pedoman dalam penyusunan LKIP Tahun 2014.

Dengan mempedomani hasil-hasil review Kemenpan dimaksud, kegiatan-kegiatan Tahun 2015 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir tahun 2015 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan 4 (empat) sasaran yang ditetapkan. Semua sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dicapai dengan memuaskan. Adapun keempat sasaran beserta indikatornya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator Hasil Review Kemenpan

NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN
		Prosentase kepemilikan armada angkutan umum (AKDP) perseorangan menjadi badan hukum
		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat

NO	SASARAN	INDIKATOR
3	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)
4	Meningkatnya Ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi

Prosentase penggunaan anggaran Tahun 2015, dari pagu anggaran sebesar Rp. 245.400.125.062,- telah direalisasikan sebesar Rp. 192.081.931.011,- atau sebesar 78,27 %. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 53.318.194.051,- atau 21,73% dari keseluruhan anggaran Belanja Langsung (BL) dari 61 kegiatan.

Pencapaian kinerja sasaran dan pelaksanaan 61 (enam puluh satu) kegiatan (Murni 59 Kegiatan, berkurang 2 kegiatan dan bertambah 4 kegiatan), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam tahun 2015 dari output maupun outcome yang dihasilkan dapat mengakselerasi pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Dari empat sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup berhasil meskipun belum semua indikator dapat dicapai dengan sangat memuaskan.

Pencapaian indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Capaian Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja Program RPJMD Tahun 2013-2018	Satuan	Realisasi		
			2013	2014	2015
1	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	persen	15,83	17,02	19,06

No	Indikator Kinerja Program RPJMD Tahun 2013-2018	Satuan	Realisasi		
			2013	2014	2015
2	Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi	persen	79.25	79,25	88,11
3	Tingkat Penurunan pelanggaran muatan lebih	unit	348.380	283.820	262.552
4	Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor	persen	40	47,50	65
5	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru	persen	8,47	11,94	22.01
6	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan	persen	42,11	47,37	58,98
7	Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat	Km	1135,442	1135,442	1135,44

Namun berdasarkan review kemenpan Tahun 2014 terdapat beberapa perubahan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Indikator hasil review kemenpan ini secara keseluruhan capaian dapat dinyatakan berhasil secara memuaskan, dengan rata-rata capain : 96.68 %, hal itu dapat ditampilkan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3

KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015
(Hasil Review Kemenpan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	*persen*	44,44%	44,44%	100,00%
2	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum	*persen*	25,17%	21.80%	86.61%
3	Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	*persen*	*91%*	88,11%	96,82%
4	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	*persen*	78%	77.7%	99.62%
5	Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	*persen*	100%	71,92%	71,92%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015
1	2	3	4	5	6
6	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi	*persen*	19,00%	19,06%	100,32%
7	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	*persen*	60,61%	58,98%	97,31%
8	Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	*persen*	73,56%	72,83%	99,01%
9	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	*persen*	23,39%	22.01%	94.01%

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa berdasarkan capaian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2015, semua sasaran yang dirumuskan belum sepenuhnya dapat tercapai secara optimal. Hal ini diharapkan dapat mendorong seluruh komponen Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan memberikan landasan atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Sebagai gambaran, berikut evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 berdasarkan sasaran dan indikator hasil review kemenpan tahun 2015.

A. Sasaran dan Capaian Indikator Sasaran

Sasaran dan Indikator sasaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan target serta realisasinya dapat dilihat dari 2 tipe yaitu

1. Sasaran dan capaian indikator sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Sasaran dan Capaian Indikator Sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2015	Realisasi 2015
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ (menuju zero accident) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi dan pengembangan informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	25.90-39.77	19.06
2	Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman;	Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi	87.55-91.70	88.11
3	Meningkatkan penanganan dan pengendalian muatan lebih (overloading)	Tingkat Penurunan pelanggaran muatan lebih	153.045	262.552
4	a. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri; b. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.	Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor	57.5-67.5	65
5	Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat, antara lain melalui dukungan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity, Pangkalan Udara Citarate di Kabupaten Sukabumi, pengembangan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastranegara, Bandara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, Pangkalan Udara Atang Sanjaya di Kabupaten Bogor, Pangkalan Udara Kalijati di Kabupaten Subang, Pangkalan Udara Cibeureum di Kabupaten Tasik, Pangkalan Udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya, Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran; serta Bandara strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru	22-57	22.01
6	Terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut regional, antara lain melalui pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai pintu gerbang ekspor dan perdagangan Jawa Barat Bagian Timur, pembangunan Pelabuhan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi, mendorong pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Jawa Barat, serta pengembangan pelabuhan laut regional Jawa Barat bagian Selatan, serta pelabuhan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan	56-67	58.98

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2015	Realisasi 2015
1	2	3	4	5
7	terlaksananya pengembangan angkutan massal antara lain mewujudkan pembangunan shortcut Cibungur Tanjung Rasa monorel di Kawasan Metropolitan Bandung, mendorong pembangunan jalur kerata api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati – Cirebon, pembangunan jalur KA Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten, pembangunan jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang, reaktivasi jalur KA Bandung-Tanjungsari, Kadipaten-Cirebon, Bandung-Ciwidey, Banjar-Pangandaran, Garut-Cikajang, pembangunan KRL (kereta listrik) pada jalur Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka, elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek, pembangunan jalur ganda KA dan KRL jalur Kiaracondong-Rancaekek dan Rancaekek-Cicalengka, rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong, rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi), rel ganda KA Perkotaan Parung Panjang-Tenjo, rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea, mengembangkan jalur-jalur baru kereta api serta optimalisasi jalur yang telah ada, Reaktivasi jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi; pembangunan jalur kereta api khusus barang/ kargo; serta jalur KA dan sarana transportasi massal strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah	Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat	*1135,442*	1135,442

2. Sasaran dan capaian indikator sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan Hasil Review Kemenpan , dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Sasaran dan Capaian Indikator Sasaran
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hasil Review Kemenpan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015 (%)	Capaian 2015 (%)	Realisasi 2015 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN	44,44%	44,44%	100,00%
		Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum	25,17%	21.80%	86.61%
		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	*91%*	88,11%	96,82%
2.	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	78%	77.7%	99.62%
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	100%	71,92%	71,92%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015 (%)	Capaian 2015 (%)	Realisasi 2015 (%)
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	60,61%	58,98%	97,31%
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	73,56%	72,83%	99,01%
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	23,39%	22.01%	94.01%
4.	Meningkatnya Ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi	19,00%	19,06%	100,32%

B. Hasil kegiatan Tahun 2015

Hasil Kegiatan pada setiap program di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Hasil Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2015

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
14		Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
	01	Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Ikilm	Terlaksananya rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan tersusunnya rancangan dokumen Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Transportasi
29		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	02	Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tersusunya Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Bara Tahun 2016, Terselenggaranya Forum SKPD dan Laporan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Laporan kinerja dan Laporan UKP4
	03	Verifikasi/ Monitoring Bantuan Gubernur Bidang Perhubungan	Laporan hasil verifikasi usulan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan, Rekomendasi kepada TAPD Jawa Barat, Laporan Monitoring dan Evaluasi

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
48		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
	04	Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Cirata	Tersusunnya dokumen DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Cirata
	05	Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Saguling	Tersusunnya dokumen DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Saguling
	06	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat	penataan halaman kantor pos pengawasan kebon coklat, pembangunan kantor pos pengawasan pelabuhan galumpit, pembangunan garasi speedboat di pelabuhan Tanggul Usman, Pembangunan garasi speedboat di Pelabuhan Kalipucang
	07	Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat	terlaksananya koordinasi pembangunan dan reaktivasi perkeretaapian di Jawa Barat baik penyampaian Informasi, koordinasi rapat, sinergitas program dan kegiatan perkeretaapian termasuk pembuatan perjanjian kerjasama
	08	DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari Tahap II	tersusunnya dokumen DED Pembangunan Jalur Kereta Api Cirebon – Kertajati – Rancakek segmen Tanjungsari – Rancaekek bangunan di 3 (tiga) jembatan di dangdeur, Jembatan Cincin dan Jembatan Cigondok serta 3 (tiga) stasiun yaitu Stasiun Rancaekek, Stasiun Jatinangor dan Stasiun Tanjungsari
	09	Sertifikasi Jalur Kereta Api Shortcut Cibungur - Tanjungrasa	Terselesaikannya proses administrasi , sertifikasi pasca pembebasan lahan dan lahan kompensasi kehutanan
	10	Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Di Jabar Bagian Utara	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dukungan pelabuhan laut internasional di Jawa Barat Bagian Utara
	11	Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP Penyeberangan Sungai Citanduy di Padaherang (Jabar-Jateng)	Tersusunnya dokumen DED Pembangunan Pelabuhan ASDP Penyeberangan Sungai Citanduy di Padaherang (Jabar-Jateng)
	12	Pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai Pintu Gerbang Ekspor dan Perdagangan Bagian Timur	terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai pintu gerbang ekonomi Jawa Barat bagian timur
	13	Penyusunan study kelayakan pelabuhan laut regional Jabar Bagian Utara	Tersusunnya Dokumen Study Kelayakan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat Bagian Utara

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
	14	BIJB - Koordinasi Pembangunan BIJB Kertajati Kab. Majalengka	terselenggaranya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan monitoring kegiatan pembangunan BIJB yang dilaksanakan PT.BIJB maupun OPD/instansi terkait, antara lain terhadap pengadaan dan pengelolaan aset, pembangunan bandar udara dan infrastruktur penunjang, penanganan dampak sosial serta mengenai pembiayaan dan investasi
	15	Penerangan sekitar Bandara di Nusawiru untuk Menunjang PON XIX	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan di Sekitar Bandara Nusawiru
	16	Penataan Lahan Parkir untuk Menujang PON XIX	Peningkatan Lahan Parkir untuk mendukung PON XIX 2016 dan Landasan Terjun Panyung
	17	Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat	tersusunnya dokumen laporan hasil pemantauan fasilitas sisi udara, listrik, elektronika, telekomunikasi, navigasi Bandar udara, heliport dan tegakan (bangunan) pada KKOP Bandara di Wilayah Provinsi Jawa Barat
	18	BIJB - Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati	Tersusunnya Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati
	19	BIJB-Studi Intermodality Layanan Transportasi Di BIJB Kertajati	tersususunnya dokumen tentang Study Intermodality Layanan Transportasi di BIJB Kertajati
	20	BIJB-Penyusunan DED Gedung Display BIJB Kertajati	Tersusunnya dokumen Penyusunan DED Gedung Display BIJB Kertajati Majalengka Jawa Barat
	21	BIJB - Project Management Service (PMS) untuk Pembangunan BIJB Kertajati	1 (satu) buah Dokumen Kerangka Acuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pelelangan pekerjaan Project Management Service (PMS) untuk Pembangunan BIJB Kertajati
	22	PON - Pembangunan Hanggar Bandara Nusawiru untuk Kegiatan Terjun Panyung PON XIX	terlaksananya Pembangunan Hanggar Bandara Nusawiru untuk menduklung Kegiatan Terjun Payung PON XIX
	61	Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat	terlaksananya Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat Tahun 2015 seluas 37,10 Ha, sehingga sampai akhir tahun 2015 telah terbebaskan tanah BIJB seluas 910,83 Ha
	64	Lanjutan Pengadaan Lahan Pembangunan Shortcut jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa	Terlaksananya pengadaan lahan kompensasi Kehutanan untuk pembangunan jalur shortcut kereta api Cibungur – Tanjungrasa di Desa Cibatu, Konsultan Review Appraisal Lahan Kompensasi kerhutanan di Desa Cibukamanah Desa Cibatu Kabupaten Purwakarta

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
49		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	
	23	PON - Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016	terpasangnya fasilitas lalu lintas penunjang PON XIX Tahun 2016 yaitu Rambu Lalu Lintas : 388 unit; Water Barrier : 400 buah; Stick Lamp : 565 buah; Marka Jalan : 5.000 M' dan Kerucut Lalu Lintas : 2.650 buah dan satu kegiatan Jasa Konsultansi perencanaan PON XIX
	24	Pemasangan dan Pengoperasian CCTV beserta Penentuan Lokasi Fasilitas Lalu Lintas	terpasangnya CCTV Outdoor di Jawa Barat sebanyak : 23 Unit
	25	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	terlaksananya peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka,dan guadraill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi,berupa : Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 10 Paket, Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan 1 Paket, Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell 54 Unit, Belanja Modal Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas 7 Paket, Pengadaan dan Pemasangan RPPJ uk 120 x 240 cm UPTD LLAJ Wilayah I : 4 Unit, Pengadaan ATCS Kota Bogor 1 Paket, Belanja Modal Pengadaan Traffic Cone 558 Buah, Belanja Modal Water Barrier 134 Buah, Belanja Modal Pengadaan RPPJ Portable 12 Buah, Warning Light 18 Unit, Pengadaan Portal 2 Lokasi dan Pemeliharaan PJU
	26	Pengembangan Fasiltas Lalu Lintas di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan	jasa Konsultansi Pengawasan 8 Paket, Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 1 kegiatan, Pengadaan dan Pemasangan Marka jalan 93.500 M2, Rambu 479 Buah, Pagar Pengaman Jalan : 144 M, PJU Solar Cell 65 Buah, Kerucut 630 Buah, Water Barier 95 Buah, Warning Light 16 Buah dan Portal di 2 (dua) Lokasi
	27	PON - Fasilitasi PJU menuju Lokasi-lokasi Venue untuk Cabor (untuk Menunjang PON XIX)	terpasangnya lampu penerangan jalan umum solar cell sebanyak : 51 Unit
50		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
	28	Penyelenggaraan Angkutan Perorangan Menjadi Badan Hukum	Peralihan Perizinan Angkutan Penumpang Umum AKDP Jawa Barat dari Perorangan menjadi Badan Hukum Indonesia (Perseroan terbatas dan Koperasi)

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
	29	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Pelajar pelopor keselamatan transportasi darat dan lomba tertib lalu lintas	Terlaksananya kegiatan Awak Kendaraan Umum Teladan : 35 orang Terlaksananya kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat : 54 orang Terlaksananya Lomba Tertib lalu Lintas : 27 Kabupaten/Kota
	30	Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat	terlaksananya kegiatan evaluasi Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan terlaksananya kegiatan Analisa Dampak Lalu intas dan Forum LLAJ
	31	Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat	Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum dan formasi tarif ideal (format perhitungan tarif kementerian perhubungan di konversikan dengan aspek sosial ekonomi dan perubahan atau fluktuasi tarif yang durasinya sangat pendek atau per 3 bulan)
	32	Operasional Bus Sekolah	Drop (Adanya perubahan hibah ke pemerintah Kota Bandung)
	33	Operasional BRT sebanyak 30 unit	Drop (Akan dihibahkan sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK,79/UM.302/ DRJD/2015 tentang Alokasi Bantuan Bus BRT untuk Kota Aglomerasi kepada Perum DAMRI dan Perum PPD TA. 2014)
	34	Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	terlaksananya penyusunan dokumen tentang Rencana Induk Jaringan Lalu LIntas dan Angkutan Jalan : 1 Dokumen
	35	Kajian Sistem Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area	Tersedianya dokumen tentang Kajian Sistem Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area
	65	Inventarisasi dan Penetapan Simpul/Terminal Implementasi Undang-Undang No. 23 TH 2014	terlaksananya persiapan inventarisasi simpul terminal Tipe B di Jawa Barat Implementasi Undang-Udang 23 Tahun 2014
51		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
	36	Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat	terlaksananya pengawasan dengan kegiatan operasi gabungan di lokasi terminal dan ruas jalan bersama unsur Dishub Kab/Kota,TNI dan Polri, terlaksananya pembinaan pengawasan dan pengendalian di Jembatan Timbang serta penempatan TNI,Polri di Jembatan Timbang, tersedianya sarana pendukung operasional pengawasan dan pengendalian. VMS, Vidio Recorder, Alat Timbang Portable, Alat Ukur Meter Digital, Jaket, terlaksananya survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Unit Kerja Jembatan Timbang

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
	37	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Tersusunnya Rencana Operasi, terselenggaranya Rapat Koordinasi 4 kali, terselenggaranya angkutan Lebaran, tersusunnya dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan, terselenggaranya Pelaksanaan Poskoda, Poskotis, Posko pasar tumpah dan terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan
	38	Pengembangan sistem e-enforcement di Jembatan Timbang Jawa Barat	terlaksananya Pengembangan Fasilitas e-Enforcement Jembatan Timbang di Jawa Barat, Terlaksananya pengoperasian fasilitas e-Enforcement di Jembatan Timbang, Terlaksananya koordinasi pengumpulan data base kendaraan Dinas Perhubungan Se- Jawa Barat, Terpeliharanya perlatan system e-Enforcement di Jembatan Timbang : 3 Unit
52		Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	
	39	Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat	terlaksananya pembinaan kepada perusahaan karoseri, terselenggaranya rapat koordinasi dengan Kabupaten/kota ,terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta terlaksananya supervisi dan koordimnasi ke Kabupaten/kota
	40	Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe	terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 pada pelayanan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe
57		Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	
	63	Kajian Akademis Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Jawa Barat	tersusunnya kajian akademis Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Jawa Barat
59		Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	
	41	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	terselenggaranya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui : Perlengkapan Olah raga, Jasa Kesehatan, Pakaian Batik, Pakaian Olah raga Belanja Peralatan dan Kursus/Pelatihan
60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	42	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara	Terpenuhinya Pelayanan Operasional Kegiatan Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara selama 1 (satu) Tahun

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
	43	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	tersedianya Peralatan kantor yang memadai melalui : Belanja Alat Kantor, Belanja Alat listrik dan Elektronik dan Pengadaan jasa kantor : Telepon, Air dan Listrik, Surat Kabar, Internet, Dokumen dan Publikasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Belanja Cetak, Penggandaan, Sewa Tenda, Makan Minum dan Air Minum
	44	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta	Terlaksananya operasional kantor sebagai berikut: belanja Alat Tulis Kantor 4 Kali, belanja materai & perangko 4 Kali , belanja peralatan kebersihan 4 kali, belanja surat kabar 12 Bulan, belanja cetak 4 Kali, belanja penggandaan Fotocopy 30.000 lembar, belanja makanan dan minuman rapat 1 Paket, belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah 1 Kegiatan, belanja jasa listrik 12 Bulan, belanja jasa internet 12 Bulan, belanja jasa air 12 Bulan, belanja jasa telepon 12 Bulan
	45	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan	Terselenggaranya administrasi Perkantoran UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon – Priangan diantaranya Belanja ATK 4 Kali, Belanja Perangko, Materai dan benda Pos 4 kali, Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 4 Kali, Belanja Jasa Telepon 12 Bulan, Belanja Jasa Air 12 Bulan, Belanja Jasa Listrik 12 Bulan, Belanja Surat Kabar 12 Bulan, Belanja Cetak 4 Triwulan, Belanja Photo Copy 39.380 Lembar, Belanja Penjilidan 100 Buku, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480 Box, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan
	46	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP	Terselenggaranya administrasi perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP seperti alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik, telpon dan fax, langganan air, listrik, surat/majalah, internet, kilat khusus, belanja cetak, penggandaan/fotokopi, pelaksanaan rapat koordinasi dan belanja perjalanan dinas

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	47	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasaranan Kantor 1 (satu) Tahun Anggaran 2015 meliputi: Peningkatan Atap Geladak dan Ruang Operasional JT. Kemang 1 Paket, Peningkatan Mushola JT. Cibaragalan 1 Paket, Belanja Modal Pengadaan Load Cell 4 Unit, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Air Bersih/ Air Minum JT. Balonggandu 1 Paket, Pematangan Lahan Di Cipeuyeum (Lanjutan) 1 Kegiatan, Pembuatan Talud Di Cipeuyeum 1 Kegiatan, Pengurugan Lahan Tanah Belakang (Kolam) JT. Balonggandu 1 Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display, Pemasangan Paving Block kantor UPTD LLAJ Wil.I Bogor-Purwakarta, Belanja Kawat Berduri untuk Pagar JT. Kemang, Belanja Pengadaan Baliho, Belanja Modal Handy Talkie, Belanja Modal Pengadaan Pompa Air, Belanja Modal Alat Komunikasi Reaviter, Belanja Modal Pembangunan Pondasi Alat Timbang JT. Kemang, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Kamar Mandi/WC JT. Bojong, Belanja Modal Girder JT. Balonggandu 600x200x9000
	48	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan	Belanja Honorarium 3 paket, Pengaspalan Jalan Keluar Masuk JT. Tomo, Sumedang 1 Kegiatan, Pembuatan Pagar dan Benteng Ktr. UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon – Priangan di Losarang, Indramayu 1 Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Printer Ink Jet 6 Unit, Belanja Modal Pengadaan Repeater 1 Unit, Belanja Modal Pengadaan Load Cell 5 Unit, Belanja Modal Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik JT. Losarang, Indramayu 1 Kegiatan, Belanja Modal Pengurugan JT. Tomo, Sumedang 1 Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Saluran Air Kotor JT. Losarang, Indramayu 1 Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Talud JT. Gentong, Tasikmalaya 1 Kegiatan
	49	Proses Sertifikasi Tanah Pengganti (Tanah Kas Desa)	Terlaksananya Fasilitas Pembayaran Tanah Pengganti Bandara Terbitnya Sertfikasi Bandara Nusawiru dan BIJB Kertajati Jawa Barat

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
	50	PON - Revitalisasi Tahap III Balai Pengelolaan Bandar Udara dan Instalasi Bandar Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru	Tersedianya Fasilitas dan sarana prasarana di Balai Pengelolaan Bandar Udara khususnya Sarana Bandara di Bandara Nusawiru, berupa : Pengadaan alat penyimpan arsip tahan api : 1 Unit, Pengadaan dan pemasangan CCTV di Bandara Nusawiru : 1 Paket, Pengadaan Televisi Gedung VIP dan Mess : 2 Unit , Pengadaan dan Pemasangan Genset 125 KVA: 1 Unit , Pengadaan dan Pemasangan Gordyn dan teralis ; 1 Paket, Pengadaan Meja Kursi Tamu Gedung VIP : 2 Set, Pengadaan Kulkas Gedung VIP : 1 Unit, Sekat gedung terminal : 1 Paket, Pengadaan Station Wheater : 1 Unit, Peningkatan Jalan penumpang dan terminal ke apron : 1 kegiatan, Pelebaran Jalan dan Jembatan Jalan Inspeksi Bandara Nusawiru : 1 kegiatan, Pembangunan Jaringan air bersih/air minum : 1 kegiatan, Pembangunan Pagar Bandara Nusawiru : 1 paket, Overlay Rinway , Taxiway dan apron : 1 paket, Pembuatan Marking Runway, Taxiway dan Apron: 1 paket, Pembangunan Taxyway : 1 paket, Pengadaan Teropong (Binocular) : 2 unit, Pengadaan dan Pemasangan Komonical Fixed Telecomonication Network (NFTN) : 1 Unit, Rehabilitasi Saluran terbuka di Bandara Nusawiru : 1 kegiatan, Baligo : 1 Kegiatan, Pembuatan alat peraga Informasi Pembangunan Jawa Barat : 1 unit
	51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP	Rubber boat 3 unit, mesin pemotong rumput 1 unit, Mesin Penghancur Kertas 2 unit, AC Split 1 PK 1 unit, Pengadaan Air Bersih 2 Paket, printer A4 4 Unit dan printer A3 2 unit, Scanner 2 buah, Sice 4 buah, Pembangunan Mess di Majingklak 1 paket, Rehab mess Maleber 1 paket, Perbaikan Talud Pos Pengawasan Servis Jatiluhur, PJU Solar Cell 9 Unit, Pemasangan Listrik di Mess Maleber 1 Paket, Pemasangan Instalasi Telepon dan Internet 4 Paket, Pemasangan Bilboard 2 Paket
	52	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor melalui Pengadaan Printer, Mesin Foto Copy : 1 paket, Pengadaan Tenda : 1 paket, Pengadaan Komputer : 10 Unit, Laptop : 3 Unit, Printer : 10 Unit, Kamera CCTV : 1 paket, Alat Pemancar : 1 Set dan Alat Kedokteran Klinik Dishub : 1 Paket

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	53	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor, melalui : Belanja Peralatan kebersihan dan pembersih, Bahan Bakar Minyak, Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, STNK, Pembasmi hewan, Service Kendaraan, Pelumasan, Jasa Konsultan, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Alat studio/Komunikasi, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Instalasi Jaringan, Pemeliharaan halaman taman pekarangan
	54	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta 1 (satu) Tahun Anggaran 2015 terdiri dari: Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4 Bulan, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 Kali, Belanja Jasa Kebersihan 12 Bulan, Belanja Jasa Keamanan 12 Bulan, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6 Unit, Belanja Service 5 Bulan, Belanja Pelumas 5 Bulan, Belanja Pemeliharaan dan Pengecatan JT. Balonggandu 1 Kali, Belanja Pemeliharaan dan Pengecatan JT. Bojong 1 Kali, Belanja Pemeliharaan dan Pengecatan JT. Cibaragalan 1 Kali, Belanja Pemeliharaan dan Pengecatan JT. Kemang 1 Kali, Pemeliharaan Jalan Keluar Masuk JT. Cibaragalan, Purwakarta 1 Kegiatan, Pemeliharaan Jalan Keluar Masuk JT. Balonggandu Karawang 1 kegiatan, Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital JT. Balonggandu 1 Kegiatan, Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital JT. Bojong 1 Kegiatan, Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital JT. Cibaragalan 1 Kegiatan, Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital JT. Kemang 1 Kegiatan, Belanja Pemeliharaan Kantor JT. Balonggandu Karawang 1 kali, Belanja Pemeliharaan Mess JT. Balonggandu Karawang 1 kali, Belanja Pemeliharaan Mess JT. Bojong Cianjur 1 kali, Pemeliharaan dan Pemindahan Alat Timbang JT. Kemang Kab. Bogor 1 kegiatan

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	Hasil Kegiatan
1		2	3
	55	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4 Kali, Belanja Bahan Pecah Belah 4 Kali, Belanja Jasa Kebersihan 12 Bulan, Belanja Jasa Keamanan 12 Bulan, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8 Unit, Belanja Service 12 Bulan, Belanja Pelumas 12 Bulan, Pemeliharaan Mushola 1 Kegiatan, Pengecatan/ Pelaburan JT. Losarang 1 Kegiatan, Pemeliharaan KM/ WC 1 Kegiatan, Belanja Pemeliharaan Halaman/ Taman/ Pekarangan 1 Kegiatan, Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 1 Kegiatan, Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital Tomo 4 Triwulan, Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital Gentong 4 Triwulan Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital Sindangrasa 4 Triwulan Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital Losarang 4 Triwulan, Pemeliharaan Jembatan Timbang Mekanik JT. Gentong 4 Triwulan
	56	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP	terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 1 (satu) tahun angaran 2015
	57	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara	Terpeliharanya sarana dan prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara agar menunjangtugas operasional dinas dan pelayanan publik
66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	58	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Tersusunya dokumen perencanaan dan program, evaluasi kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, - Terusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); - Tersusunya Bahan LKPJ, LAKIP, LPPD dari Dinas Perhubungan Prov. Jawa Barat; - Tersusunnya Laporan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan; Kegiatan Penatausahaan Keuangan : - Laporan Keuangan Bulanan; - Laporan Keuangan Triwulanan; - Laporan Keuangan Semesteran
79		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	
	59	Peningkatan sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Peningkatan Sistem Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan Website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2015 pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

1. **Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**

   Kegiatan Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Ikilm

   Permasalahan : kurangnya data dan informasi mengenai program-program yang berkenaan dengan penurunan emisi gas rumah kaca bidang Transportasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota

   Solusi : memanfaatkan data dan informasi dari berbagai sumber baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan dapat dipertanggungjawabkan

2. **Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.**

   Tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

3. **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

   a. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat

      Permasalahan : kegiatan pembangunan area parkir didanai oleh APBN 2015 sehingga terhadap anggaran yang tersedia diusulkan dalam perubahan APBD-P 2015 dialokasikan untuk membiayai sarana dan prasarana lainnya

      Solusi : mengalokasikan anggaran untuk sarana prasarana lainnya meliputi Pengadaan PJU solar cell di LLASD Kebon Coklat 5 Unit, Pengadaan PJU solar cell di LLASD Muara Gembong 5 Unit, Penataan halaman kantor pos pengawas kebon coklat 1 paket, Pembangunan kantor pos pengawas pelabuhan Galumpit 1 paket, Pembangunan garasi speed boat di pel. Tanggul usman 1 unit, Pembangunan garasi speedboat di pel. Kalipucang 1 unit

   b. Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat

      Permasalahan : (1) dengan adanya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka aturan kerjasama pemerintah pusat dan daerah perlu menunggu lahirnya Peraturan Pemerintah turunan dari Undang – undang tersebut (2) banyak hal yang diluar kewenangan seperti pusat dan daerah serta ketidakpastian perencanaan pembangunan seperti dalam pembangunan yang di danai / bekerjasama dengan pihak swasta/investor/kerjasama pemerintah

dan swasta, aturan yang belum mendukung seperti penanganan perlintasan sebidang dll

Solusi : menyiapkan draft perjanjian yang diperlukan sambil menunggu aturan tentang kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka kegiatan perkeretaapian lainnya

c. DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari Tahap II

Permasalahan : sinkronisasi perencanaan dengan tahap I mengingat banyak hal yang harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan saat ini seperti perubahan titik stasiun akibat rencana pembangunan Bangunan di Universitas Pajajaran

Solusi : berkoordinasi secara intensif dengan pihak pekerjaan DED tahap I, Ditjen Perkeretaapian dan pihak Unpad

d. Kegiatan Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Di Jabar Bagian Utara

Permasalahan : Pembangunan Pelabuhan Internasional di lokasi Cilamaya tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Pusat sesuai arahan Wakil Presiden RI tanggal 2 April 2015, karena lokasi Cilamaya mengganggu pipa gas Pertamina sehingga perlu dikaji ulang di lokasi lain di luar Cilamaya

Solusi : dilakukan perubahan nomenklatur kegiatan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan kajian di lokasi lain dan rapat Pembahasan Progres Rencana Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional (Pengganti Cilamaya) di Prakarsai oleh Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan yang diadakan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Desember 2015

e. Kegiatan BIJB - Koordinasi Pembangunan BIJB Kertajati Kab. Majalengka

Permasalahan : Koordinasi/rapat-rapat dengan OPD/instansi lain seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, OPD lain di lingkungan Pemprov. Jabar, PT. PLN, PT. PDAM Kab. Majalengka, PT. Telkom, LPPNPI (PT. Airnav), BMKG, Pertamina yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, secara kuantitas tidak sesuai dengan target yang direncanakan, mengingat PT. BIJB memiliki aktivitas serupa dalam melakukan koordinasi dengan OPD/instansi terkait, sehingga anggaran untuk pelaksanaan rapat-rapat tidak diserap seluruhnya

Solusi : Dinas Perhubungn Provinsi Jawa Barat secara terus menerus melakukan upaya koordinatif dengan PT. BIJB dan instansi terkait lainnya dengan lebih mengefektifkan pertemuan-pertemuan yang mendukung terwujudnya percepatan pembangunan BIJB Kertajati

f. Kegiatan BIJB - Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati

Permasalahan : Proses lelang yang dilakukan mulai bulan April namun Pokja ULP menyelesaikan kegiatan pelelangan hingga bulan Juli 2015 (lebih kurang 2 bulan), sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Semester I pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan Volume pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dikurangi (tidak melaksanakan kegiatan pemantauan lingkungan pada Semester I) mengakibatkan perubahan (adendum) Kontrak terhadap pemenang lelang yang mengakibatkan perubahan pagu kegiatan/pekerjaan

Solusi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terus melakukan upaya koordinatif terhadap penyedia jasa agar Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan pada Semester II dapat sesuai dengan yang telah ditetapkan (tertuang) di dalam kontrak dan Terkait pekerjaan dimaksud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan semua pemenuhan administrasi agar proses lelang untuk pekerjaan serupa di tahun mendatang dapat segera dilaksanakan paling lambat Bulan Februari tahun 2016

g. Kegiatan BIJB - Project Management Service (PMS) untuk Pembangunan BIJB Kertajati

Permasalahan : Proses pengajuan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan dimaksud sudah digulirkan sejak tanggal 28 Mei 2015, akan tetapi dengan masih adanya perbaikan-perbaikan (penyempurnaan) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri sehingga perlu dilakukan konsultasi lebih lanjut, maka dipandang perlu dilakukan revisi terhadap Kerangka Acuan Pekerjaan dan HPS tersebut; Beban kerja dan volume pekerjaan dari Pokja ULP Jasa Konsultasi yang bertugas menangani kegiatan Penyusunan Dokumen Project Management Service (PMS) untuk Pembangunan BIJB Kertajati sangat besar (tinggi) sehingga proses pelelangan pekerjaan dimaksud baru terlaksana pada awal September 2015; Kegiatan pelelangan sebagaimana dimaksud mengalami Gagal Lelang (sesuai Laporan

Hasil Seleksi Umum Pokja Jasa Konsultansi ULP Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 September 2015), dengan demikian mengingat pekerjaan penyusunan Dokumen Project Management Service (PMS) membutuhkan waktu 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender, maka tidak memungkinkan dengan waktu yang tersisa kurang lebih hanya 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender dapat dilakukan kegiatan dimaksud, mengingat waktu proses tender pekerjaan membutuhkan waktu selama 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender. Dengan demikian tidak memungkinkan melakukan proses lelang ulang pekerjaan Penyusunan Dokumen Project Management Service (PMS) untuk Pembangunan BIJB Kertajati

Solusi : Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi pembangunan BIJB yang saat ini sedang dalam proses penyusunan dan dapat dtetapkan pada tahun ini, maka kiranya kegiatan Penyusunan Dokumen Project Management Service (PMS) untuk Pembangunan BIJB Kertajati tidak sangat diperlukan karena OPD terkait pembangunan BIJB sudah mempunyai pedoman berupa Peraturan Gubernur dimaksud

h. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

i. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Perorangan Menjadi Badan Hukum

Permsalahan : rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peralihan perizinan perorangan ke badan hukum Indonesia terutama perubahan identitas asset (kendaraan) menjadi atas nama Badan Hukum Indonesia (Perseroan terbatas dan Koperasi) dan sebagian jasa keuangan atau *leasing* tidak memberikan dokumen angkutan penumpang umum untuk balik nama (SK Trayek/operasi dan BPKB)

Solusi : Peningkatan koordinasi pelaksanaan angkutan penumpang umum menjadi Badah Hukum dengan Kabupaten dan Kota se Jawa Barat, Sosialisasi dan anjuran kepada pengusaha angkutan/operator

peralihan izin perorangan menjadi badan hukum, pembinaan manajemen usaha koperasi dengan bantuan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, serta konsolidasi perwujudan peralihan perizinan kepada lembaga pemberi kredit/leasing kendaraan angkutan umum

b. Kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat

Permasalahan : Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada th 2015 tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena Paket Jasa Konsultansi Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :

1. Mengalami gagal lelang
2. Dilakukan kembali Lelang Ulang
3. Kontrak dari Paket tersebut selesai pada bulan akhir Desember 2015
4. Karena keterbatasan waktu untuk uji coba pelaksanaan Rekayasa lalu lintas maka tidak bisa dilaksanakan

Solusi : di usulkan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat pada tahun 2016

c. Kegiatan Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat

Permasalahan : tidak dapat dilaksanakan penyusunan formulasi tarif ideal penetapan tarif angkutan umum karena penggabungan formulasi variabel atau komponen tarif sesuai dengan Permenhub Nomor 52 tahun 2006 Perubahan atas Kepmenhub Nomor 89 tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum antar kota Kelas Ekonomi tidak bias dilaksanakan, dan terdapat disparitas aspek sosial ekonomi, fluktuasi perubahan harga minyak dunia dan kurs rupiah dan Tahun 2015 Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan akan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan tentang penetapan biaya pokok angkutan dan tarif bis kelas ekonomi sehingga hasilnya menjadi acuan penerapan tarif di daerah

Solusi : Melaksanakan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran seefektif mungkin (memanfaatkan sesuai dengan ketersediaan waktu)

d. Kegiatan Inventarisasi dan Penetapan Simpul/Terminal Implementasi Undang-Undang No. 23 TH 2014

Permasalahan : Rencana kegiatan pada bulan Agustus 2015 sedangkan penandatanganan DPPA perubahan pada pertengahan bulan Oktober sehingga tidak dapat dilaksanakan

Solusi : perlu dianggarkan pada Tahun 2016 dikarenakan target Undang-undang 23 tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016

j. Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas

a. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat

Permasalahan : khususnya pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian adalah : (1) Masih tingginya angka pelanggaran yang dilakukan kendaraan angkutan barang dan penumpang umum yang dioperasikan yaitu mengenai Laik Jalan (kondisi/usia teknis kendaraan) , Dimensi, Overloading, cara muatan serta penyalahgunaan izin trayek serta pelanggaran administrasi para awak kendaraan SIM STNK BUKU UJI, hal ini untuk tahun selanjutnya perlu dilakukan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara efektif sehingga menimbulkan efek jera dengan melakukan koordinasi dengan Instansi atau lembaga terkait mengenai penegakan sanksi dan pengembangan sistim yang terintegrasi. (2) Belum adanya aturan sistem tarip angkutan barang, dan saat ini didasarkan pada kesepakatan dua belah pihak (pengguna dan penyedia), dan belum adanya sistem logistik angkutan barang, sehingga melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan truk masih dominan. (3) Banyaknya lokasi galian C yang tidak terawasi secara optimal baik dari jenis kendaraan yang seharusnya disesuaikan dengan kelas jalan atau yang dizinkan, harus dilakukan koordinasi dan pengawasan secara intensif dilokasi penambangan serta evaluasi oleh Pemerintah Daerah

Solusi : • Pengembangan Moda angkutan barang melalui Jalur Kereta Api, Laut serta pembangunan Jalan Tol. • Pembangunan Sistem Penindakan yang harus teintegrasi dengan data /unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten/ Kota, sehingga dapat dibuatkan produk hukum berupa perda atau pergub kaitan dengan besaran Denda yang diakibatkan

oleh pelanggaran atau penahanan untuk penerbitan buku uji selanjutnya. Dan • Perlu dilakukan pengawasan secara berkelanjutan baik melalui Operasi Gabungan yang dilaksanakan oleh Provinsi maupun pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pihak Kepolisian atau Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota

b. Kegiatan Pengembangan sistem e-enforcement di Jembatan Timbang Jawa Barat

Permasalahan : system pengembangan E-enforcement yang terintegrasi dengan data Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten/Kota tidak dapat terlaksana karena dari hasil konsultasi kegiatan tersebut akan dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat baik system yang ada di PKB Kab/Kota maupun yang di Jembatan Timbang, sehingga kegiatan hanya dalam bentuk operasionalisasi perangkat system saja yang sudah terbangun di 3 JT dan evaluasi data perangkat system E-enforcement di PKB seluruh Jabar

Solusi : Dilaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan mengingat program E-enforcement merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan

k. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan bermotor

Tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

l. Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah

Tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

m. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

n. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

o. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

p. **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

q. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

r. **Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah**

Pada Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah dan Keuangan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan) terlampir dalam formulir J-1 (rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD).

2.1.1. Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah Antisipatif

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja yang mempengaruhi program pembangunan maupun program kegiatan.

Namun kami menyadari bahwa segala upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik sekecil apapun selalu mendapatkan hambatan dan pelaksanaannya tidak sesempurna sesuai dengan harapan.

Dalam pencapaian Sasaran Tahun 2015, terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain adalah :

1. Peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Banyaknya peraturan di bidang Perhubungan, baik darat, laut dan udara memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, yang kadang-kadang di lapangan menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari.

Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masih akan memerlukan waktu panjang untuk menyesuaikan peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas;

   Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan menajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/Balai/UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

   Selain berkurang dari sisi jumlah, kebutuhan kompetensi di Bidang Darat/Laut dan Udara juga mendesak untuk dipenuhi, mengingat ketiga moda tersebut terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampailan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.

3. Pengalokasian Anggaran Belum Sepenuhnya Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja

   Kendala yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran, sedangkan indikator yang harus dicapai berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tertulis secara kuantitatif. Dengan adanya target atau angka/ digit tertentu pada indikator tertentu, juga telah dapat ditentukan berapa Rupiah alokasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal tersebut dapat dilihat dan diketahui dalam hampir setiap RPJMD maupun Renstra masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Namun Indikator yang telah ditetapkan belum berbanding lurus dengan pengalokasiaan anggaran pada suatu program / kegiatan yang telah ditentukan, pada periode Rencana Tahunan yang disusun setiap tahunnya. Sehingga masih perlu Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran untuk mendiukung pencapaian target indikator program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra. Hal ini memerlukan politik anggaran atau

kebijakan anggaran yang kuat dari berbagai pihak setiap tahunnya, indikator mana yang akan dicapai dengan anggaran APBD yang terbatas pada setiap tahunnya. Atau kebijakan yang kuat dalam menentukan skala prioritas yang akan dicapai, karena masa jabatan Gubernur selama 5 (lima) tahun.

4. Pembangunan Infrastruktur memerlukan biaya yang besar, hal ini juga menjadi kendala

   Biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur Transportasi, memerlukan jalan keluar yang sistematis dan terukur, baik secara peraturan maupun secara politik penganggaran. Pelibatan swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi tentu harus dinaungi dengan peraturan perundangan yang harmonis, transparan dan akuntable. Karena seringkai kendala peraturan, menimbulkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, karena melibatkan berbagai pihak, dan kekahawatiran akan menimbulkan masalah hukum di belakang hari. Sehingga diperlukan terobosan hukum untuk memecahkan masalah tersebut

Dalam tahun 2015 pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan bidang perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, Sedangkan penanganan tugas pokok sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan lainnya belum maksimal dilaksanakan, mengingat penanganan bidang perhubungan memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta semua stakeholder.Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pada tahun tahun mendatang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mampu melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah Provinsi dibidang perhubungan dan menjadikan dinas yang dapat mendukung dalam kerangka pembangunan daerah Jawa Barat khususnya pembangunan disektor perhubungan.

Sedangkan kendala dan hambatan yang mengemuka secara umum dalam pembangunan bidang Perhubungan antara lain adalah :

1. Peningkatan Fasilitas lalu Lintas Jalan

a. Kendala dan Hambatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bahwa Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

a. Rambu Lalu Lintas;
b. Marka Jalan;
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d. alat penerangan Jalan;
e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Dalam pasal 26 disebutkan bahwa Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:

a. Pemerintah untuk jalan nasional;
b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan
d. kabupaten/kota dan jalan desa; atau
e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan dalam rangka menajemen dan rekayasa lalu lintas.

Sesuai pasal 7 Perda Nomor 3 Tahun 2011 disebutkan bahwa penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi c.q. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang *Improving Global Road Safety* melalui Program *Decade of Action for Road Safety* 2011-2020 yang telah dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Keselamatan Jalan dalam rangka penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama.

Dalam melaksanakan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi 5 (lima) Pilar yaitu Manajemen Keselamatan Jalan, Jalan yang Berkeselamatan, Kendaraan yang Berkeselamatan, Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan, dan Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan Pilar Kedua : Jalan Yang Berkeselamatan adalah dengan program Perencanaan dan Pelaksanaan PerlengkapanJalan di Ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat yaitu dengan meningkatkan pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat berupa Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan dan Panerangan Jalan Umum (PJU) serta mendorong Kabupaten/ Kota di Jawa Barat untuk memenuhi Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jalan Lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bantuan keuangan kepada Kabupaten/ kota berupa pemenuhan fasilitas lalu lintas jalan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat fisik yaitu pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di jalan Provinsi di Jawa Barat. Kebutuhan prasarana fasilitas lalu lintas Jalan di Jawa Barat ini terdapat pada program

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam program ini, terdapat permasalahan yaitu fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan telah terpasang masih menunjukkan kekurangan-kekurangan dari sisi kuantitas. Disisi lain fasilitas lalu lintas yang terpasang merupakan barang/benda yang sangat rentan terhadap kehilangan pencurian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dilakukan adalah pihak Dinas Perhubungan akan mengusulkan secara bertahap kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan provinsi di Jawa Barat setiap tahunnya dan mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan standar teknis fasilitas lalu lintas yang mempunyai nilai ekonomis rendah sehingga mengurangi resiko terjadinya pencurian. Usaha lain adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya fasilitas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan penggunaan jalan

Sesuai data yang ada, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Tahun 2012-2015

URAIAN	MARKA	PAGAR PENGAMAN JALAN / GUARDRAIL	RAMBU	PJU KONVEN SIONAL	PJU SOLAR CELL	Capaian Indikator
satuan	m'	unit	unit	unit	unit	%
Kebutuhan	6.061.000	80.925	24.373	38.486	16.494	
Jumlah Terpasang s.d Tahun 2012	1.405.550	20.877	3.808	144	70	13,08%
Jumlah terpasang s.d Tahun 2013	1.584.575	21.047	6.098	434	142	15,83%
Jumlah Terpasang s.d Tahun 2014	1.672.575	21.207	6.728	658	331	17,02%
Jumlah Terpasang s.d Tahun 2015	1.870.275	21.431	8.100	658	501	19,06%

Hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan adalah meningkatnya kelancaran dan kenyamanan ber lalu lintas dengan terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat, berupa pemasangan Rambu

Lalu lintas, PJU (Solar Cell dan konvensional), Pagar Pengaman Jalan, marka jalan dan Laporan Hasil Updating dan inventarisasi/kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan, laporan updating data tingkat pelayanan jalan provinsi dan laporan updating data rawan kecelakaan lalu lintas, maka peningkatan fasilitas lalu lintas di jalan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan dan dalam sosialisasi dan pendidikan masyarakat untuk menuju tertib lalu lintas. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2015, prosentase ketersediaan fasiltas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Barat mencapai 19.06 %.

Bila dibandingkan dengan panjang jalan baik yang berstatus Jalan Nasional, Jalan Provinsi, maupun Jalan Kabupaten/Kota, fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan yang telah terpasang masih menunjukkan kekurangan-kekurangan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Walaupun dari tahun ke tahun, Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota telah berupaya untuk menambah baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, namun hal tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada.

b. Langkah Antisipatif :

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan dan pendidikan masyarakat yang secara berkesinambungan untuk meningkatkan keselamatan penggunaan jalan, Dinas Perhubungan berupaya untuk mengusulkan kembali pada setiap tahun anggaran untuk dapat memenuhi kekurangan-kekurangan dan memelihara fasilitas lalu lintas jalan.

2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Kendala dan Hambatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan serta untuk meningkatkan kinerja aparat Dinas, tentunya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran menjadi suatu hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Terdapat beberapa sarana dan prasarana perkantoran yang saat ini dirasakan belum dapat mendukung dan meningkatkan (walaupun tidak sampai pada tahapan menghambat) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Kendala tersebut berupa kekurangan fasilitas sarana perkantoran seperti perangkat pendukung kerja, prasarana di jembatan timbang, kendaraan operasional, dan lokasi prasarana jembatan timbang.

b. Langkah Antisipatif

Untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas tersebut, Dinas Perhubungan berupaya untuk mengusulkan pada tahun berikutnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kekurangan tersebut serta tetap mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dengan melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkelanjutan. Salah satunya dengan revitalisasi UPTD/Balai dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

2.1.2. Strategi Pemecahan Masalah

Dari uraian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas diperlukan upaya dan strategi secara bersama untuk meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan.

Dengan adanya kendala tersebut, maka strategi yang diterapkan dalam upaya pemecahannya adalah dengan menggunakan strategi skala prioritas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan bahwa tujuan pencapaian visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai sasaran utama masih tetap dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Selain itu diperlukan strategi terobosan yang terencana dan bertahap agar tujuan akhir dari pelayanan bidang Perhubungan berupa penyelenggaraan perhubungan yang mengembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan.

2.1.3. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

Berdasarkan pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Perhubungan, penyelenggaraan Perhubungan bertujuan untuk:

a. mewujudkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
b. mewujudkan etika penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan udara; dan
c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dan Sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Perhubungan, bahwa penyelenggaraan perhubungan berasaskan :

1) asas transparansi;
2) asas akuntabilitas;
3) asas berwawasan lingkungan hidup;
4) asas berkelanjutan;
5) asas partisipatif;
6) asas manfaat;
7) asas efisien dan efektif;
8) asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
9) asas keterpaduan;
10) asas kemandirian;
11) asas keadilan;
12) asas kepentingan umum;
13) asas kedaulatan; dan
14) asas kebangsaan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sesuai RPJPD perencanaan pembangunan telah memasuki periode 2013 – 2018. Berdasarkan perencanaan jangka panjang daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 berada pada tahapan untuk memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh sebagai upaya menyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu RKPD juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk tahun yang sama.

Di dalam perencanaan strategis yang disusun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu :

1. Tujuan dan Sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018 yang dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang berkualitas, yang mampu mendukung pelayanan transportasi yang efisien	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan.
2	Terwujudnya pelayanan transportasi laut dan ASDP yang handal	Terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut regional, antara lain melalui pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai pintu gerbang ekspor dan perdagangan Jawa Barat Bagian Timur, pembangunan Pelabuhan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi, mendorong pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Jawa Barat, serta pengembangan pelabuhan laut regional Jawa Barat bagian Selatan, serta pelabuhan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
3	Terwujudnya pelayanan transportasi darat yang efisien	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ (menuju zero accident) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi dan pengembangan informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan
		Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman
		Terlaksananya pengembangan angkutan massal antara lain mewujudkan pembangunan shortcut Cibungur Tanjung Rasa monorel di Kawasan Metropolitan Bandung, mendorong pembangunan jalur kerata api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati – Cirebon, pembangunan jalur KA Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten, pembangunan jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang, reaktivasi jalur KA Bandung-Tanjungsari, Kadipaten-Cirebon, Bandung-Ciwidey, Banjar-Pangandaran, Garut-Cikajang, pembangunan KRL (kereta listrik) pada jalur Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka, elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek, pembangunan jalur ganda KA dan KRL jalur Kiaracondong-Rancaekek dan Rancaekek-Cicalengka, rel ganda parsial jalur

No	Tujuan	Sasaran
		KA Cisomang-Cikadondong, rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi), rel ganda KA Perkotaan Parung Panjang-Tenjo, rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea, mengembangkan jalur-jalur baru kereta api serta optimalisasi jalur yang telah ada, Reaktivasi jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi; pembangunan jalur kereta api khusus barang/ kargo; serta jalur KA dan sarana transportasi massal strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
4	Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang terintegrasi dan mampu menjangkau wilayah lebih jauh.	Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat, antara lain melalui dukungan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity, Pangkalan Udara Citarate di Kabupaten Sukabumi, pengembangan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastranegara, Bandara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, Pangkalan Udara Atang Sanjaya di Kabupaten Bogor, Pangkalan Udara Kalijati di Kabupaten Subang, Pangkalan Udara Cibeureum di Kabupaten Tasik, Pangkalan Udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya, Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran; serta Bandara strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
5	Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian transportasi yang akuntabel	Meningkatkan penanganan dan pengendalian muatan lebih (overloading)
		a. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri; b.Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor

2. Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada hasil review kemenpan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Hasil Review Kemenpan

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum
3	Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi
4	Meningkatnya Ketersediaan perlengkapan Jalan	Meningkatnya Ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menyusun strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 khususnya di bidang transportasi dan perhubungan dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada.

Pada dasarnya, sistem transportasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu *supply* (sarana prasarana), *demand* (permintaan atau kebutuhan akan sarana prasarana), pola pergerakan, dan kebijakan atau regulasi. Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk suatu sistem transportasi.

Keempat komponen transportasi bisa saling mempengaruhi secara positif atau negatif antara satu dengan yang lainnya. Permintaan yang berlebihan, misalnya pesatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan guna lahan di suatu daerah. Jika tidak disertai dengan pemenuhan sarana prasarana transportasi berupa ketersediaan angkutan umum, jaringan jalan, dan terminal akan sangat mempengahi pola pergerakan di daerah tersebut. Untuk itu diperlukan intervensi kebijakan dan perencanaan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan antara *demand* dan *supply.* Kekeliruan pengambilan kebijakan atau perencanaan untuk mengatasi persoalan dengan sendirinya akan menimbulkan persioalan-persoalan lain yang semakin kompleks yang bisa berdampak pada aspek sosial, politik dan ekonomi. Salah satu isu nasional yang mengemuka karena persoalan sistem transportasi adalah buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia tidak efisien, memiliki kondisi lingkungan budaya yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan.

Menyadari betapa rentannya sistem transportasi dan kompleksitas persoalan yang dapat terjadi, Dinas Perhubungan Jawa Barat mencoba merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi persoalan sistem transportasi di Jawa Barat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Menurut RPJMD Tahun 2013-2018, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan strategi yaitu Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi

publik regional yang nyaman dengan menerapkan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan.

2.1.4. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

Dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang telah disusun, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional pada kurun waktu 2013-2018. Langkah-langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari program tertuang dalam RPJMD Porovinsi Jawa Barat 2013-2018. Program Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan RPJMD dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Program Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

No	Kode Program	Program	Keterangan
1	14	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Bidang Perencanaan Pembangunan
2	29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan Pembangunan
3	49	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Bidang Perhubungan
4	50	Program Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Perhubungan
5	51	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Bidang Perhubungan
6	52.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Bidang Perhubungan
7	53	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	Bidang Perhubungan
8	57	Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah	BidangOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
9	59	Program Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Aparatur	BidangOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
10	60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BidangOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
11	61	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	BidangOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
12	62	Program Pemeliharan Sarana Dan Prasarana Aparatur	BidangOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Kode Program	Program	Keterangan
13	66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BidangOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
14	75	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Bidang Statistik

Keempat belas program tersebut disusun sebagai acuan bagi penyusunan kegiatan sekretariat dan Bidang/Balai/UPTD yang ada di lingkup Dinas Perhubungan Jawa Barat pada perioda 2013-2018. Pencapaian masing-masing program tersebut akan diukur berdasarkan indikator keluaran. Adapun kegiatan dari masing-masing program tersebut yang dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang diuraikan sebagai berikut:

A. Sekretariat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat adalah sebagai berikut:

29		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	02	Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah
	03	Verifikasi/ Monitoring Bantuan Gubernur Bidang Perhubungan
57		Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
	63	Kajian Akademis Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Jawa Barat
59		Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
	41	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	43	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	52	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
	53	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	58	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
79		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
	59	Peningkatan sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

B. Bidang Transportasi Darat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

48		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
	19		BIJB-Studi Intermodality Layanan Transportasi Di BIJB Kertajati
49		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	
	23		PON - Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016
	24		Pemasangan dan Pengoperasian CCTV beserta Penentuan Lokasi Fasilitas Lalu Lintas
	27		PON - Fasilitasi PJU menuju Lokasi-lokasi Venue untuk Cabor (untuk Menunjang PON XIX)
50		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
	28		Penyelenggaraan Angkutan Perorangan Menjadi Badan Hukum
	29		Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Pelajar pelopor keselamatan transportasi darat dan lomba tertib lalu lintas
	30		Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat
	31		Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat
	32		Operasional Bus Sekolah
	33		Operasional BRT sebanyak 30 unit
	34		Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
	35		Kajian Sistem Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area
	65		Inventarisasi dan Penetapan Simpul/Terminal Implementasi Undang-Undang No. 23 TH 2014

C. Bidang Transportasi Laut dan ASDP

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Transportasi Laut dan ASDP adalah sebagai berikut:

48		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
	04		Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Cirata
	05		Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Saguling
	10		Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Di Jabar Bagian Utara
	11		Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP Penyeberangan Sungai Citanduy di Padaherang (Jabar-Jateng)
	12		Pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai Pintu Gerbang Ekspor dan Perdagangan Bagian Timur
	13		Penyusunan study kelayakan pelabuhan laut regional Jabar Bagian Utara
51		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
	37		Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

D. Bidang Transportasi Udara

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Transportasi Udara adalah sebagai berikut:

48			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	14		BIJB - Koordinasi Pembangunan BIJB Kertajati Kab. Majalengka
	17		Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat
	18		BIJB - Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati
	20		BIJB-Penyusunan DED Gedung Display BIJB Kertajati
	21		BIJB - Project Management Service (PMS) untuk Pembangunan BIJB Kertajati

E. Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi adalah sebagai berikut:

14			Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	01		Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Ikilm
48			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	07		Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat
	08		DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari Tahap II
	09		Sertifikasi Jalur Kereta Api Shortcut Cibungur - Tanjungrasa
	64		Lanjutan Pengadaan Lahan Pembangunan Shortcut jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa
51			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
	36		Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat
	38		Pengembangan sistem e-enforcement di Jembatan Timbang Jawa Barat
52			Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor
	39		Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat
	40		Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe

F. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) LLAJ Wilayah I Bogor Purwakarta adalah sebagai berikut:

49			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
	25		Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah I Bogor
60			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	44		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta

61			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	47		Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta
62			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
	54		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta

G. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan adalah sebagai berikut:

49			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
	26		Pengembangan Fasiltas Lalu Lintas di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan
60			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	45		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan
61			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	48		Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan
62			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
	55		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan

H. Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (BPPL dan ASDP)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan adalah sebagai berikut:

48			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	06		Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat
60			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	46		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP
61			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	51		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP
62			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
	56		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP

I. Balai Pengelolaan Bandar Udara (BPBU)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengelolaan Bandar Udara (BPBU) adalah sebagai berikut:

48		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
	15		Penerangan sekitar Bandara di Nusawiru untuk Menunjang PON XIX
	16		Penataan Lahan Parkir untuk Menujang PON XIX
	22		PON - Pembangunan Hanggar Bandara Nusawiru untuk Kegiatan Terjun Panyung PON XIX
	61		Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat
60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	42		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara
61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	49		Proses Sertifikasi Tanah Pengganti (Tanah Kas Desa)
	50		PON - Revitalisasi Tahap III Balai Pengelolaan Bandar Udara dan Instalasi Bandar Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru
62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	57		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara

Di dalam pelaksanaan RKPD dan Renja, ada beberapa hal yang akan diperhatikan yaitu isu-isu strategis dan perubahan lingkungan strategis yang kontekstual, masalah yang dihadapi pada tahun berjalan, peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi arah dan pengembangan pembangunan. Dalam pelaksanaannnya juga akan memperhatikan ketersediaan tenaga, dana, fasilitas yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan

Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara, bina sistem operasional transportasi;

b. Penyelenggaraan fasilitasi dan perhubungan meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, dan sistem operasional transportasi;

c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perhubungan meliputi transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara, dan bina sistem operasional transportasi;

d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;

Kewenangan :

Sebagai landasan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas juga telah dilengkapi dengan peraturan daerah yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan diatur kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perkeretaapian, Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, serta Penyelenggaraan Perhubungan Udara.

A. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Darat adalah :

1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalulintas dan angkutan jalan provinsi;
2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B;
4. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;
5. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B;
6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
7. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi;

8. Pemberian izin trayek angkutan antarkota dalam Provinsi;
9. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;
10. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
12. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
13. Pemberian izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan di kawasan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
14. Pemberian rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan yang melampaui atau melebihi wilayah Provinsi;
15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antarkota dalam Provinsi;
16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalulintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas di jalan Provinsi;
19. Penyelenggaraan analisis dampak lalulintas di jalan Provinsi;
20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas di jalan Provinsi;
21. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
22. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan;
23. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan Provinsi;

24. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
    a. Peraturan Daerah Provinsi bidang lalulintas dan angkutan jalan;
    b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
    c. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
    d. perizinan angkutan umum.
25. Pembentukan dan penetapan forum lalulintas dan angkutan jalan.

B. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah :
1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
2. Pembinaan dalam :
    a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota;
    b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa; dan
    c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Provinsi;
3. Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan;
7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antarkota melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan

11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.

C. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan adalah :

1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau),dalam hal :
   a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi;
   b. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi;
   c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
   d. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;
   e. Pelaksanaan pengukuran kapal;
   f. Penerbitan pas perairan daratan;
   g. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
   h. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi;
   i. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
   j. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
   k. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; dan
   l. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar hanya di laut dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
4. Pengelolaan pelabuhan regional lama;
5. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi;
6. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
7. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;

8. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
10. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
11. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional;
12. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
13. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional;
14. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut internasional hub;
15. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut internasional;
16. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut nasional;
17. Penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut regional;
18. Izin reklamasi di dalam dlkr/dlkp pelabuhan laut regional;
19. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
20. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional;
21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
23. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional;
24. Penetapan duks di pelabuhan regional;
25. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
26. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
27. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas);
28. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;

29. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
30. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur *(tramper)* bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
31. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur *(liner)* dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur *(tramper)* bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan internasional (lintas batas);
32. Izin usaha *tally* di pelabuhan;
33. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
34. Izin usaha ekspedisi/*freight forwarder*;
35. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
36. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
37. Izin usaha depo peti kemas;
38. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi;
39. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jalan provinsi;
40. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
41. Pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan (SDP);
42. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, dlkr/dlkp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api;
43. Penetapan rencana induk dan dlkr/dlkp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
44. Penetapan kelas alur pelayaran sungai;
45. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;

46. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi;
47. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
48. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
49. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
50. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi;
51. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sdp antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
52. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
53. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
54. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi; dan
55. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.

D. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Udara adalah :

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan kepada Pemerintah;
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan serta melaporkan kepada Pemerintah;
4. Mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah;
5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan kepada Pemerintah;
6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;

7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan melaporkan kepada Pemerintah;
8. Persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara tidak terjadual antar Kabupaten/Kota dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara non berjadual antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah;
10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
11. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan kepada Pemerintah;
12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan kepada Pemerintah;
13. Pemberian izin ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU);
14. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan EMPU;
15. Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada Pemerintah;
16. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU;
17. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk angkutan udara dari dan ke luar negeri disertai alasan dan data pendukung yang memadai kepada Pemerintah;
18. Pemberian rekomendasi penetapan bandar udara umum;
19. Pemantauan terhadap keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
20. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk;

21. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
22. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
23. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan Ground Support Equipment (GSE), pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara.
24. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
25. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
26. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
27. Izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya;
28. Pemberitahuan pemberian izin pembangunan bandar udara khusus;
29. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara;

30. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
31. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
32. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
33. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
34. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
35. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
36. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
37. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, meliputi :
    a. Investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
    b. Monitoring pesawat udara milik Pemerintah, berkoordinasi dengan unit kerja terkait; dan
    c. Membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing.

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dalam upaya mendukung pencapaian visi pemerintah provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Perhubungan Jawa Barat menetapkan visi sebagai berikut:

"Terwujudnya sistem pergerakan yang Handal dan Efisien"

Visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dapat dijabarkan dalam 2 (dua) kata kunci (*key words*) yang perlu dijelaskan agar terjadi kesamaan persepsi dalam pemahaman visi tersebut.

Pertama: Sistem pergerakan yang handal adalah suatu keadaan di mana kebutuhan pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi dengan aman, selamat, nyaman, terjangkau, dan efektif, menjangkau seluruh daerah di Jawa Barat serta mendukung pembangunan provinsi jawa barat menuju jawa barat maju dan sejahtera untuk semua.

Kedua: Sistem pergerakan yang efisien adalah suatu keadaan di mana kebutuhan pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi secara efisien dan dengan harga yang terjangkau serta ramah lingkungan dan dilayani oleh SDM yang profesional serta dapat mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat menuju Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk semua.

Dalam upaya pencapaian visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan menetapkan misi yang akan dilaksanakan. Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari 2 sisi yaitu:

1. Misi berdasarkan Renstra Tahun 2013-2018 yang terbagi menjadi 5 (lima) misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yaitu:
   a Mewujudkan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berkualitas
   b Mengembangkan pelayanan transportasi laut dan ASDP yang handal
   c Mengembangkan pelayanan transportasi darat yang efisien
   d Meningkatkan jangkauan pelayanan transportasi udara yang terintegrasi
   e Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian transportasi yang akuntabel
2. Misi berdasarkan hasil review Kemenpan adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatkan pelayanan transportasi di Jawa Barat
   b. Meningkatkan Jalan yang berkeselamatan di Jawa Barat

2.2.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penyusunannya, yaitu : penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.

Penetapan indikator kinerja dilakukan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran stratejik terdiri dari indikator-indikator keluaran dan hasil dengan kriteria sebagai berikut :

- Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa baik fisik dan/atau non fisik, sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja sasaran Stratejik Dinas Perhubungan pada tahun 2015 berdasarkan hasil review Menpan bahwa tingkat capaiannya sebesar 96.68 % dengan kategori penilaian baik (B) demikian juga dengan Pengukuran Kinerja kegiatannya yang merupakan pengukuran indikator realisasi (pelaksanaan kegiatan) terhadap indikator rencana (Indikator Kinerja dalam Renstra Dinas Perhubungan) pada indikator Masukan, Keluaran dan Hasil dari kegiatan-kegiatan dinas yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Rekapitulasi program/kegiatan tahun anggaran 2015 dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut.

Tabel 2.7.

Rekapitulasi program/kegiatan tahun anggaran 2015 dan realisasinya

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	PAGU ANGGARAN DPA (RP)	PAGU ANGGARAN DPPA (RP)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi %
1		2	3	4	5	6
		BELANJA (BTL+BL)	145,266,494,541.00	286,172,690,554.00	228,131,759,326.00	79.72
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	39,598,296,041.00	40,772,565,492.00	36,049,828,315.00	88.42
		BELANJA LANGSUNG	105,668,198,500.00	245,400,125,062.00	192,081,931,011.00	78.27
14		Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	97,500,000.00	97,500,000.00	79,055,250.00	81.08
	01	Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Ikilm	97,500,000.00	97,500,000.00	79,055,250.00	81.08

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	PAGU ANGGARAN DPA (RP)	PAGU ANGGARAN DPPA (RP)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi %
1		2	3	4	5	6
29		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	321,750,000.00	321,750,000.00	306,651,435.00	95.31
	02	Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah	195,000,000.00	195,000,000.00	192,935,235.00	98.94
	03	Verifikasi/ Monitoring Bantuan Gubernur Bidang Perhubungan	126,750,000.00	126,750,000.00	113,716,200.00	89.72
48		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	22,045,212,500.00	158,936,837,987.00	114,797,732,212.00	72.23
	04	Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Cirata	843,880,000.00	843,880,000.00	705,375,000.00	83.59
	05	Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Saguling	843,880,000.00	843,880,000.00	772,716,000.00	91.57
	06	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat	1,462,500,000.00	1,462,500,000.00	1,392,699,850.00	95.23
	07	Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat	500,000,000.00	560,400,000.00	360,001,450.00	64.24
	08	DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari Tahap II	1,868,397,500.00	1,729,291,000.00	1,695,722,000.00	98.06
	09	Sertifikasi Jalur Kereta Api Shortcut Cibungur - Tanjungrasa	302,900,000.00	65,999,987.00	65,925,837.00	99.89
	10	Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Di Jabar Bagian Utara	195,000,000.00	195,000,000.00	66,993,600.00	34.36
	11	Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP Penyeberangan Sungai Citanduy di Padaherang (Jabar-Jateng)	780,000,000.00	753,032,000.00	734,779,000.00	97.58
	12	Pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai Pintu Gerbang Ekspor dan Perdagangan Bagian Timur	146,250,000.00	146,250,000.00	101,050,000.00	69.09
	13	Penyusunan study kelayakan pelabuhan laut regional Jabar Bagian Utara	852,405,000.00	852,405,000.00	729,499,850.00	85.58
	14	BIJB - Koordinasi Pembangunan BIJB Kertajati Kab. Majalengka	292,500,000.00	370,500,000.00	126,956,372.00	34.27
	15	Penerangan sekitar Bandara di Nusawiru untuk Menunjang PON XIX	2,925,000,000.00	2,925,000,000.00	1,883,438,400.00	64.39

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	PAGU ANGGARAN DPA (RP)	PAGU ANGGARAN DPPA (RP)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi %
1		2	3	4	5	6
	16	Penataan Lahan Parkir untuk Menujang PON XIX	4,631,250,000.00	4,631,250,000.00	3,924,035,800.00	84.73
	17	Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat	146,250,000.00	146,250,000.00	116,853,114.00	79.90
	18	BIJB - Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati	705,000,000.00	705,000,000.00	260,494,950.00	36.95
	19	BIJB-Studi Intermodality Layanan Transportasi Di BIJB Kertajati	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	929,054,500.00	80.79
	20	BIJB-Penyusunan DED Gedung Display BIJB Kertajati	300,000,000.00	300,000,000.00	252,199,528.00	84.07
	21	BIJB - Project Management Service (PMS) untuk Pembangunan BIJB Kertajati	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	15,264,250.00	1.39
	22	PON - Pembangunan Hanggar Bandara Nusawiru untuk Kegiatan Terjun Panyung PON XIX	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,778,371,150.00	92.61
	61	Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat	-	133,656,200,000.00	95,525,168,450.00	71.47
	64	Lanjutan Pengadaan Lahan Pembangunan Shortcut jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa	-	3,500,000,000.00	2,361,133,111.00	67.46
49		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	32,412,500,000.00	31,297,614,800.00	28,075,066,782.00	89.70
	23	PON - Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016	7,550,000,000.00	7,015,800,000.00	5,863,644,330.00	83.58
	24	Pemasangan dan Pengoperasian CCTV beserta Penentuan Lokasi Fasilitas Lalu Lintas	3,502,650,000.00	3,884,550,000.00	2,627,757,586.00	67.65
	25	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	9,366,010,000.00	8,949,019,000.00	8,789,805,200.00	98.22
	26	Pengembangan Fasiltas Lalu Lintas di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan	10,043,840,000.00	9,466,695,800.00	8,994,554,416.00	95.01

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	PAGU ANGGARAN DPA (RP)	PAGU ANGGARAN DPPA (RP)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi %
1		2	3	4	5	6
	27	PON - Fasilitasi PJU menuju Lokasi-lokasi Venue untuk Cabor (untuk Menunjang PON XIX)	1,950,000,000.00	1,981,550,000.00	1,799,305,250.00	90.80
50		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	8,141,250,000.00	4,208,970,000.00	2,881,865,376.00	68.47
	28	Penyelenggaraan Angkutan Perorangan Menjadi Badan Hukum	292,500,000.00	292,500,000.00	151,770,188.00	51.89
	29	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Pelajar pelopor keselamatan transportasi darat dan lomba tertib lalu lintas	487,500,000.00	487,500,000.00	474,354,000.00	97.30
	30	Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat	731,250,000.00	731,250,000.00	443,700,488.00	60.68
	31	Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat	292,500,000.00	292,500,000.00	106,186,500.00	36.30
	32	Operasional Bus Sekolah	1,462,500,000.00	-	-	
	33	Operasional BRT sebanyak 30 unit	2,925,000,000.00	-	-	
	34	Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1,462,500,000.00	1,462,500,000.00	1,316,582,200.00	90.02
	35	Kajian Sistem Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area	487,500,000.00	487,500,000.00	380,531,800.00	78.06
	65	Inventarisasi dan Penetapan Simpul/Terminal Implementasi Undang-Undang No. 23 TH 2014		455,220,000.00	8,740,200.00	1.92
51		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4,522,000,000.00	4,515,000,000.00	3,448,710,317.00	76.38
	36	Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat	2,407,500,000.00	2,407,500,000.00	1,699,204,875.00	70.58
	38	Pengembangan sistem e-enforcement di Jembatan Timbang Jawa Barat	652,000,000.00	652,000,000.00	320,714,100.00	49.19
52		Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	365,625,000.00	418,015,000.00	365,316,555.00	87.39
	39	Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat	292,500,000.00	344,890,000.00	296,936,555.00	86.10

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	PAGU ANGGARAN DPA (RP)	PAGU ANGGARAN DPPA (RP)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi %
1		2	3	4	5	6
	40	Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe	73,125,000.00	73,125,000.00	68,380,000.00	93.51
57		Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	-	150,000,000.00	96,378,250.00	64.25
	63	Kajian Akademis Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Jawa Barat	-	150,000,000.00	96,378,250.00	64.25
59		Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1,462,500,000.00	1,632,601,600.00	1,282,617,925.00	78.56
	41	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	1,462,500,000.00	1,632,601,600.00	1,282,617,925.00	78.56
60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,408,750,000.00	5,758,634,750.00	5,165,847,276.00	89.71
	42	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara	341,250,000.00	489,250,000.00	388,585,526.00	79.42
	43	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	2,337,500,000.00	2,539,800,000.00	2,278,949,189.00	89.73
	44	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta	975,000,000.00	974,584,750.00	945,900,463.00	97.06
	45	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan	975,000,000.00	975,000,000.00	962,345,146.00	98.70
	46	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP	780,000,000.00	780,000,000.00	590,066,952.00	75.65
61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,761,500,000.00	30,889,812,275.00	28,733,151,329.00	93.02
	47	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta	975,000,000.00	1,796,028,225.00	1,791,096,850.00	99.73
	48	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan	975,000,000.00	2,320,459,200.00	2,300,386,397.00	99.13
	49	Proses Sertifikasi Tanah Pengganti (Tanah Kas Desa)	487,500,000.00	1,847,500,000.00	1,798,195,607.00	97.33

KODE Prog/ Keg		Prog/Kegiatan	PAGU ANGGARAN DPA	PAGU ANGGARAN DPPA	Realisasi	
			(RP)	(RP)	Keuangan (Rp.)	%
1		2	3	4	5	6
	50	PON - Revitalisasi Tahap III Balai Pengelolaan Bandar Udara dan Instalasi Bandar Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru	20,761,500,000.00	21,445,150,000.00	19,789,148,100.00	92.28
	51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP	1,462,500,000.00	2,280,710,850.00	2,008,512,850.00	88.07
	52	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	100,000,000.00	1,199,964,000.00	1,045,811,525.00	87.15
62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,915,111,000.00	6,993,638,650.00	6,677,597,454.00	95.48
	53	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	2,778,361,000.00	2,981,861,000.00	2,868,204,184.00	96.19
	54	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta	704,950,000.00	1,469,977,650.00	1,441,619,847.00	98.07
	55	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan	955,800,000.00	955,800,000.00	953,081,740.00	99.72
	56	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP	948,600,000.00	948,600,000.00	797,582,983.00	84.08
	57	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara	527,400,000.00	637,400,000.00	617,108,700.00	96.82
66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	117,000,000.00	117,000,000.00	111,640,850.00	95.42
	58	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	117,000,000.00	117,000,000.00	111,640,850.00	95.42
79		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	97,500,000.00	62,750,000.00	60,300,000.00	96.10
	59	Peningkatan sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	97,500,000.00	62,750,000.00	60,300,000.00	96.10

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terdapat dalam formulir J-2 sebagaimana terlampir.

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks. Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang sudah tidak lagi hanya menyangkut persoalan *supply* dan *demand*, tapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan. Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi massal , konversi bahan bakar fosil ke gas dan *intelegensia transport management*. Dalam hal manufaktur, pada level nasional, isu yang terus didiskusikan adalah sejauh mana industri manufaktur nasional bisa memproduksi mesin-mesin yang berstandar *euro-2* dengan tingkat emisi yang relatif rendah yang terkait dengan keinginan dan rencana Pemerintah Indonesia menurunkan tingkat emisi sebesar 26% atau setara dengan 2,9 metrik kubik karbon. Di Eropa, standar mesin-mesin yang digunakan untuk sarana transportasi sudah berstandar *euro-5*.

Adapun beberapa isu yang mengemuka di bidang transportasi yang sampai dengan saat ini masih aktual adalah :

1. Berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan harus disesuaikan dengan Undang undang nomor 23 Tahun 2014 tersebut.
2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tahun 2017 harus telah mengimplementasikan UU. No. 23 Tahun 2014 baik dari sisi urusan, organisasi dan penganggarannya.
3. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke *seamless transport.*
4. Perlunya penataan transportasi perkotaan yang memiliki kondisi lingkungan udara sehat, peningkatan daya saing serta mendorong investasi dan pertumbuhan.
5. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha rendah dan menyebabkan rendahnya produktivitas nasional.
6. Rendahnya penggunaan angkutan umum yang diindikasikan dengan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi

7. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transportasi.
8. Perlunya pengembangan dan pemanfaatan transportasi massal berbasis jalan rel sebagai alternatif pergerakan orang dan barang.
9. Telah terbitnya Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai proyek Startegis Nasional memerlukan dukungan teknis baik dari segi perencanaan maupun integrasinya, administratif dan peraturan perundangan lainnya.

Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, secara umum bidang transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan laut dihadapkan pada persoalan real (nyata) berupa rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa :

1. Kurangnya pembangunan jalan tol;
2. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai;
4. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan;
5. Belum optimalnya proses pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
6. Masih rendahnya tingkat kelaikkan kendaraan Bermotor;
7. Kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan rel;
8. Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
9. Belum optimalnya pelayanan Bandar Udara Husein Sastranegara dan bandara lainnya dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Jawa Barat;
10. Masih terbatasnya fungsi Pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan niaga.
11. Komoditas eksport dan import dari dan ke Jawa Barat masih dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, yang saat ini mengalami keterbatasan kapasitas dan aksesibilitas, sehingga diperlukan pembangunan Pelabuhan lainnya untuk mendukung pergerakan orang dan barang di wilayah Jawa Barat ;
12. Tingginya pelanggaran muatan angkutan barang di Jawa Barat.

Sementara itu, pada sisi lain ada delapan (8) tantangan utama yang di hadapi pemerintah Provinsi Jawa Barat (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013) yang hingga saat ini relevan untuk ditindaklanjuti di dalam pengembangan infrastruktur wilayahnya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pengembangan angkutan umum massal terutama untuk kota-kota yang berpenduduk padat;
2. Pengembangan jaringan jalan yang efektif dan efisien, baik berupa jaringan jalan tol maupun non tol yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam skala regional dan lokal;
3. Pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif;
4. Revitalisasi dan pengembangan jaringan jalan rel untuk melayani pergerakan dalam kota dan antarkota;
5. Pengaturan pergerakan (*traffic management*) untuk angkutan barang dan angkutan penumpang
6. Peningkatan pelayanan bandara-bandara yang telah ada dan mengembangkan bandara baru yang lebih tinggi kapasitas layanannya untuk menunjang perkembangan kegiatan perekonomian dan kegiatan-kegiatan lainnya;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan ASDP yang ada dan mengembangkan pelabuhan laut dan ASDP baru;
8. Pengembangan keterpaduan sistem transportasi dan koneksi antar moda.

Untuk menggambarkan kesesuaian antara isu-isu strategis dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut, Isu-isu strategis tersebut kemudian menjadi dasar atau acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018). Isu strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur (sumber daya manusia /SDM) Perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/perhubungan;
2. Belum berkembangnya penyediaan sistem angkutan umum massal (BRT, Kereta Api dan lain-lain) yang terpadu dan berkelanjutan, baik yang berbasis jalan maupun non jalan;
3. Rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
5. Belum termanfaatkannya IPTEK pada penyelenggaraan Transportasi Darat;

6. Belum terwujudnya pembangunan pelabuhan laut pengganti Cilamaya di Jawa Barat untuk mendukung pergerakan barang dan jasa;
7. Belum terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan laut pengumpan regional.
8. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
9. Belum terwujudnya fasilitas prasarana transportasi udara di Jawa Barat;
10. Belum terwujudnya peningkatan pengendalian dan penataan sistem transportasi.

Isu-isu di bidang transportasi tersebut masih relevan untuk dicermati sampai saat ini, mengingat persoalan transportasi di Jawa Barat belum mendapat solusi yang stabil, sehingga masyarakat belum mendapat pelayanan di bidang transportasi sesuai dengan cita-cita luhur undang-undang di bidang transportasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 (empat) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu tahapan "Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh"

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dilaksanakan melalui pendekatan: (1) *top-down*, yaitu pendekatan dengan memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat; (2) *bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/Kota; (3) teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat pada koridor peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Jabar Masagi.

Kebijakan belanja daerah 2017 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Alokasi belanja daerah harus sudah dilengkapi: 1) pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis; 2) dokumen rencana implementasi pekerjaaan (DRImP); 3) calon penerima dan calon lokasi (CPCL); dan 4) perencanaan, monitoring dan evaluasi. Kebijakan belanja daerah untuk 2017 sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritasdengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 urusan, wajib nonpelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 8 urusanserta penunjang pemerintahan sejumlah 8 urusan;
2. Dukungan RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2017;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan **20%** dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan **10%;**
5. Bantuan keuangan kab/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi;
6. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat, Pajak Rokok;
7. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Pendukungan implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 memperhatikan tiga dimensi pembangunan manusia: (1) dimensi sumber daya manusia; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan

Diagram Keterkaitan RPJMN, RPJMD Prov. Jabar dan SDGs

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Berdasarkan situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta catatan penting di atas, maka dirumuskan 16 (enam belas) isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang dikelompokan berdasarkan rujukan aspek kinerja daerah, dengan perincian sebagai berikut:

a. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:

1) ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan;

2) kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

3) konflik sosial (SARA); dan
4) ketahanan keluarga.

b. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi:
   1) aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
   2) aksesibilitas dan kualitas kesehatan;
   3) kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan dasar serta infrastruktur strategis di perdesaan dan perkotaan; dan
   4) pelaksanaan reformasi birokrasi.

c. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi:
   1) aksesibiltas, kualitas, dan daya saing ketenagakerjaan;
   2) peran dan daya saing industri kecil dan menengah;
   3) pengelolaan destinasi wisata;
   4) kesadaran politik dan penegakan hukum;
   5) peran pemuda dalam pembangunan;
   6) prestasi pemuda dalam bidang olahraga;
   7) kualitas lingkungan hidup; dan
   8) penyelenggaraan penataan ruang.

Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan Jawa Barat, serta mempertimbangkan tahapan dan capaian pembangunan RPJMD serta hasil evaluasi pembangunan pada tahun sebelumnya, maka dirumuskan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yaitu:

"Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat"

Mengacu kepada isu strategis dan tema tersebut di atas, maka arah pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah:

1) Optimalisasi pencapaian janji Gubernur dan indikator kinerja misi RPJMD untuk Tahun 2017;
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar (urusan wajib provinsi);
3) Optimalisasi pembangunan sektoral, kewilayahan, dan kawasan perbatasan; dan
4) Optimalisasi implementasi reformasi birokrasi.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah Tahun 2017 Provinsi Jawa Barat, memperhatikan perkiraan sumber-sumber pendapatan, besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, kondisi perekonomian global dan regional Jawa Barat yang ditunjukkan untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien dengan pendekatan *money follow programme.*

Prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 memperhatikan tiga dimensi pembangunan manusia: (1) dimensi sumber daya manusia; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan

Prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2017, difokuskan pada pemenuhan janji gubernur, pencapaian akumulasi target RPJMD 2013-2018, penuntasan pembangunan monumental yang belum selesai, dan pembangunan yang besifat strategis lintas kabupaten/kota

RKPD Tahun 2017 memiliki makna penting dan strategis untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dapat dilihat dari capaian: (1) aspek kesejahteraan masyarakat; (2) aspek pelayanan umum; dan (3) aspek daya saing daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada penyelenggaraan Forum OPD Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2016, untuk memaparkan rencana program/kegiatan Tahun 2017 Bidang Perhubungan, dengan mengundang unsur-unsur dari masyarakat antara lain Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), Asosiasi Perusahaan Karoseri Indonesia (ASKARINDO), Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPEKSINDO), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi di Bandung..

Dengan harapan hasil forum OPD tersebut dapat menampung masukan, saran, dan usulan dari unsur masyarakat (Kabupaten/Kota) yang dapat lebih mempertajam usulan program/ kegiatan yang terkait bidang Perhubungan.

Selain itu masukan dari unsur masyarakat tersebut selanjutnya melalui proses pelaksanaan Pra Musrenbang sesuai wilayah masing-masing dan Musrenbang Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi melalui forum OPD dan dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan pra Musrenbang maupun Musrenbang, akan dilaksanakan identifikasi program/ kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan Kabupaten/ kota yang bersangkutan atau kewenangan Pemerintah pusat, ataupun kewenangan Pemerintah Provinsi dan secara teknis telah diberikan pertimbangan pada saat pembahasan. Sehingga yang merupakan kewenangan pemerintah pusat diusulkan untuk diteruskan melalui forum Musrenbangnas atau diusulkan melalui pembahasan RKA/ KL Kementerian Perhubungan serta yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota dipertimbangkan oleh TAPD apakah akan dialokasikan melalui Bantuan Keuangan atau Belanja Tidak Langsung (BTL) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat diusulkan menjadi Belanja Langsung (BL) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tahun 2015-2019

Berdasarkan Undang-undang 17 Tahun 2007, tahun perencanaan 2015-2019 merupakan tahun ketiga dari pencapaian visi pembangunan 2005-2025 yang terdapat dalam RPJP 2005-2025, dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1
Tahun Perencanaan Jangka Menengah 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, dengan mengusung Visi presiden RI yang ketujuh yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Memperhatikan amanat RPJMN 2015-2019, Kementerian Perhubungan menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP.430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

Pada Renstra Kementerian Perhubungan disebutkan bahwa Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sebagaimana visi Presiden ke-7 (tujuh) Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan bidang transportasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.

Tantangan pembangunan infrastruktur transportasi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah bagaimana mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi termasuk pendistribusian barang sampai ke pelosok nusantara, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata serta mewujudkan pembangunan sektor unggulan, antara lain kemaritiman, kelautan, pariwisata dan industry.

Dengan adanya tantangan tersebut, perlu memperhatikan lingkungan strategis transportasi, sebagai berikut:

a. Transportasi dan Perdagangan Dunia (Global Sea Borne-Trade);
b. Transportasi Terkait Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
c. Konektivitas Transportasi Nasional;
d. Biaya Logistik Nasional;
e. Pengembangan Teknologi Transportasi Melalui ITS;
f. Isu Gender dan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Transportasi;
g. Angkutan Umum Massal.

3.1.2. SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019

Sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

a. **Handal :** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
b. **Berdaya Saing :** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
c. **Nilai tambah :** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

B. Pelayanan Transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance;*
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance;*

C. Kapasitas Transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Secara lebih jelasnya korelasi antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana pada diagram berikut ini

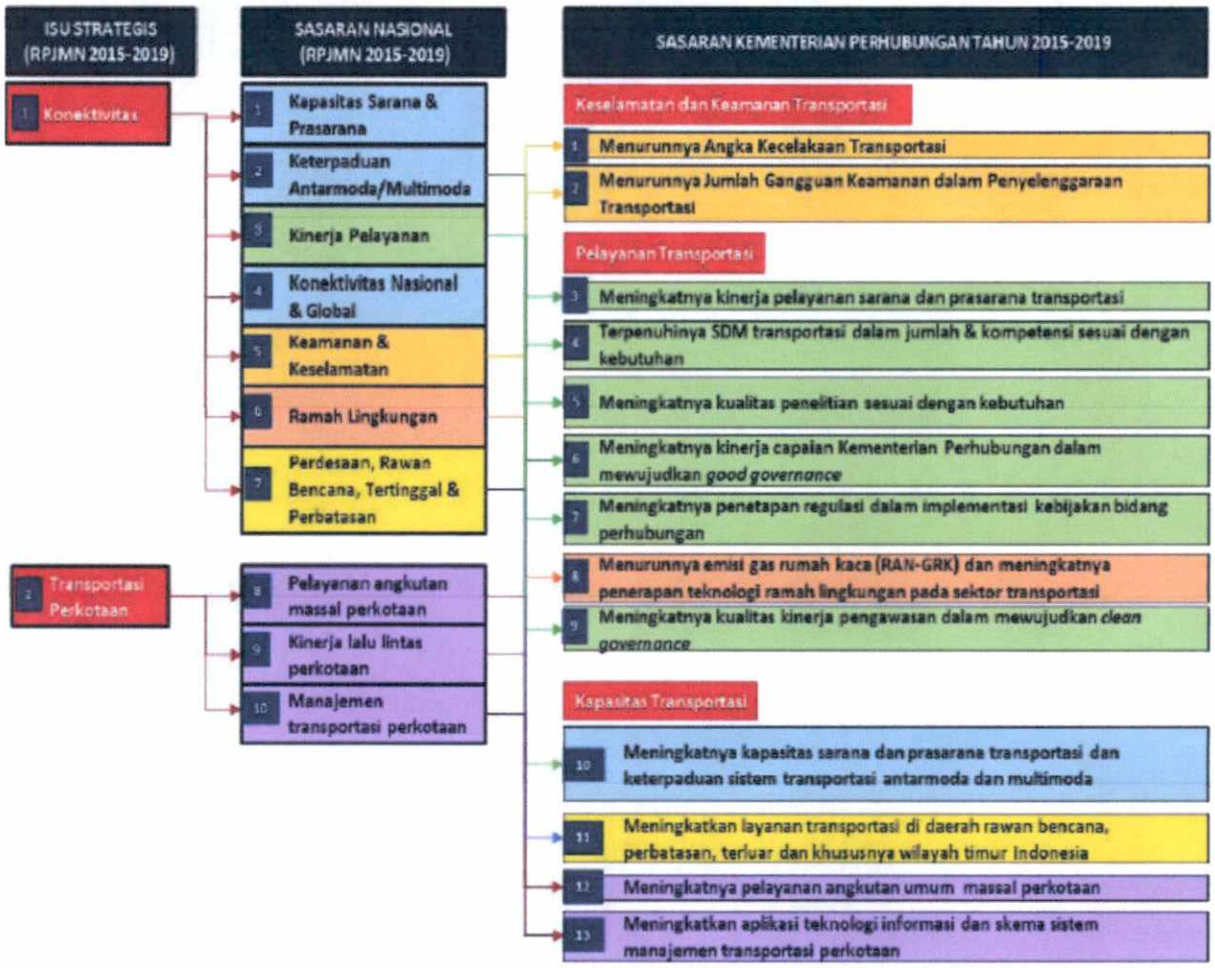

Sumber : Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019

Gambar 3.2
Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dengan
Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

3.1.3. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi

a. **Keselamatan dan Keamanan**

Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

b. **Pelayanan Transportasi**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance,* (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance.*

c. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat selaras dengan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu :

1. Tujuan dan Sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018 yang dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang berkualitas, yang mampu mendukung pelayanan transportasi yang efisien	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan.
2	Terwujudnya pelayanan transportasi laut dan ASDP yang handal	Terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut regional, antara lain melalui pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai pintu gerbang ekspor dan perdagangan Jawa Barat Bagian Timur, pembangunan Pelabuhan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi, mendorong pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Jawa Barat, serta pengembangan pelabuhan laut regional Jawa Barat bagian Selatan, serta pelabuhan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
3	Terwujudnya pelayanan transportasi darat yang efisien	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ (menuju zero accident) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi dan pengembangan informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan
		Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman
		Terlaksananya pengembangan angkutan massal antara lain mewujudkan pembangunan shortcut Cibungur Tanjung Rasa monorel di Kawasan Metropolitan Bandung, mendorong pembangunan jalur kerata api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati – Cirebon, pembangunan jalur KA Tanjungsari-Sumedang-

No	Tujuan	Sasaran
		Kertajati-Kadipaten, pembangunan jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang, reaktivasi jalur KA Bandung-Tanjungsari, Kadipaten-Cirebon, Bandung-Ciwidey, Banjar-Pangandaran, Garut-Cikajang, pembangunan KRL (kereta listrik) pada jalur Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka, elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek, pembangunan jalur ganda KA dan KRL jalur Kiaracondong-Rancaekek dan Rancaekek-Cicalengka, rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong, rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi), rel ganda KA Perkotaan Parung Panjang-Tenjo, rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea, mengembangkan jalur-jalur baru kereta api serta optimalisasi jalur yang telah ada, Reaktivasi jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi; pembangunan jalur kereta api khusus barang/ kargo; serta jalur KA dan sarana transportasi massal strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
4	Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang terintegrasi dan mampu menjangkau wilayah lebih jauh.	Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat, antara lain melalui dukungan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity, Pangkalan Udara Citarate di Kabupaten Sukabumi, pengembangan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastranegara, Bandara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, Pangkalan Udara Atang Sanjaya di Kabupaten Bogor, Pangkalan Udara Kalijati di Kabupaten Subang, Pangkalan Udara Cibeureum di Kabupaten Tasik, Pangkalan Udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya, Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran; serta Bandara strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
5	Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian transportasi yang akuntabel	Meningkatkan penanganan dan pengendalian muatan lebih (overloading)
		a. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri; b.Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor

2. Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada hasil review kemenpan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Hasil Review Kemenpan

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum
3	Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi
4	Meningkatnya Ketersediaan perlengkapan Jalan	Meningkatnya Ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan lima (5) misi yang akan dicapai. Pencapaian misi-misi ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat. Evaluasi pencapaian misi pembangunan Jawa Barat dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator RPJMD Tahun 2013-2018, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD dan evaluasi terhadap data-data BPS.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat turut serta dalam misi keempat, yaitu: Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Pencapaian misi keempat ini ditunjukkan oleh pencapaian kinerja dalam aspek infrastruktur, baik kuantitas maupun kualitas infrastruktur. Adapun infrastruktur yang fokus untuk ditingkatkan adalah infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, energi, infrastruktur keciptakaryaan dan Perhubungan. Target dan Capain Indikator Kinerja Misi Keempat Bidang Perhubungan Tahun 2014-2015 adalah indikator Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi dengan capaian pada Tahun 2014 adalah 17.02 % dan Tahun 2015 mencapai 19.06%.

Permasalahan utama bidang perhubungan adalah (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih tingginya overloading angkutan barang; (3) Belum memadainya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang baik domestik maupun internasional; (4) Belum tersedianya pelabuhan laut internasional dan belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.

3.3. Program dan Kegiatan

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat berjumlah 90 (sembilan puluh) program yang terbagi ke dalam 34 (tiga puluh empat) bidang, untuk Bidang Perhubungan yang merupakan Urusan Wajib ada 5 (lima) program yaitu sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
e. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor;

Selain program-program tersebut di atas, terdapat juga program di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang merupakan program penunjang dan kegiatan *fixed cost sebanyak 9 program yang direncanakan akan digunakan dalam kegiatan 2017,* antara lain pada **Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Bidang Statistik dan Bidang Perencanaan Pembangunan** dengan program yaitu:

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
d. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;

h. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah;

i. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Diharapkan pada periode tahun 2017 ini, target kinerja yang akan dicapai dapat mendorong pencapaiannya serta untuk mempersiapkan dan meletakkan dasar bagi tahap selanjutnya.

Program/ kegiatan yang diusulkan sebagian besar merupakan kegiatan lanjutan dan atau berkelanjutan, secara garis besar misalnya :

1. Peningkatan prasarana dalam rangka Pembangunan BIJB Kertajati Jawa Barat dan Pengembangan Bandara Nusawiru;
2. Sinegritas pembangunan dan pengembangan bandar udara di Jawa Barat
3. Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan;
4. Rencana Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan ASDP di Jawa Barat;
5. Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat;
6. Lanjutan kegiatan dalam rangka reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat;
7. Sinergitas Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat
8. Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas, Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Pemilihan Pelajar Pelopor.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, usulan kegiatan Tahun 2017 juga diwarnai dengan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan operasional Terminal Tipe B. Usulan Tahun 2017 telah diusulkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2017 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (versi tanggal 20 April 2016) dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2017

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Tahun 2017		SKPD Penanggung Jawab		
					Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	**URUSAN WAJIB**								
15	**BIDANG PERHUBUNGAN**								
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase Jaringan Trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat	*persen*	na	35.14	495,400,000	Dishub	Biro. Adm. Perekonomia, Bina Marga	Bappeda; Biro Adm. Pemb; Biro Keu
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	*persen*	33.33	66.66	3,023,550,000	Dishub	Biro. Adm. Perekonomia, Bina Marga	
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum	*persen*	*0.00*	75.05	2,499,122,400	Dishub	Biro. Adm. Perekonomia, Bina Marga	
4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase ketersediaan terminal Type B yang memenuhi standar	*persen*	na	10	9,694,710,000	Dishub	Biro. Adm. Perekonomia, Bina Marga	
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan	*persen*	na	44	4,066,700,000	Dishub	Biro. Adm. Perekonomia, Diskimrum, Bina Marga, Disdik,	

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Tahun 2017		SKPD Penanggung Jawab		
					Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
	1	2	3	4	5	6	8	9	10
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan Pengembangan Bandara Nusawiru)	*persen*	11.34	49.41	38,952,197,000	Dishub	Biro. Adm. Perekonomia, PSDA, Diskimrum, ESDM, Bina Marga, Disnakertrans, Dinkes, Disdik, BPLHD	Bappeda; Biro Adm. Pemb; Biro Keu
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	*persen*	51.5	62.36	7,800,455,000	Dishub	Biro. Adm. Perekonomia, PSDA, Diskimrum, Bina Marga, BPLHD	
8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi)	*persen*	72.83	91.3	2,478,450,000	Dishub	Biro. Adm. Perekonomia, Diskimrum, Bina Marga, BPLHD	
9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi	*persen*	17	21	31,330,075,000	Dishub	Biro. Adm. Perekonomia, ESDM, Bina Marga	

Sebagai gambaran lebih lengkap, terlampir dibawah ini Rekapitulasi rencana usulan Program/Kegiatan Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Provinsi Jawa Barat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Formulir J-4: Rencana Program dan Kegiatan OPD).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini merupakan Rencana Kerja Tahun keempat (Tahap Pemantapan) yang disusun sebagai penjabaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Sehingga Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 diharapkan dapat mengakselerasi program atau kegiatan strategis di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang merupakan kegiatan unggulan Pemrintah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun melalui umpan-balik dan masukan serta usulan dari Bidang/ Balai/ UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan atau informasi program kerja/kegiatan yang diusulkan secara tertulis dilengkapi dengan data dukung berupa proposal, smart planning, dan data dukung lainnya.

Proses perencanaan di Jawa Barat Tahun 2016, untuk tahun 2017 kali ini sedikit berbeda dengan tahun 2015, hal ini karena suasana transisi dengan berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan Kebijakan Nasional.

Idealnya, sebuah rencana kerja yang dibuat merupakan saduran dan/atau rangkuman dari rencana kerja serupa yang dibuat/disusun oleh Bidang/ Balai/ UPTD terkait di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dalam setiap Bidang/ Balai/ UPTD dan seksi memiliki tugas menyusun program kerja Bidang/ Balai/ UPTD atau seksi. Hal ini merupakan sebuah kelaziman dan kesemestian organisasi sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran dan

deskripsi yang utuh, berkesinambungan dan berstruktur yang mengalir secara *bottom-up*, dan bisa juga *top-down*, sebagai perwujudan perencanaan partisipatif.

Kegiatan-kegiatan yang diemban dan diamanahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sesungguhnya lebih banyak merupakan kegiatan "konvensional" yang cenderung sama dari tahun ke tahun, namun dalam Rencana Kerja Tahun 2017 ini lebih tegas terukur berdasarkan indikator kinerja program/ kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2013 – 2018. Kecuali untuk kegiatan strategis merupakan tindak lanjut dari kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta terdapat usulan kegiatan baru yang merupakan konsekuensi dari penetapan indikator kinerja program/ kegiatan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2013 – 2018.

Fungsi-fungsi yang diemban organisasi seringkali tak dapat dilaksanakan atau karena ketidakcukupan dana/anggaran atau indikator kinerja program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2013 – 2018 tidak tercapai karena dalam penyusunan program kegiatan setiap tahunnya selalu mendapatkan pagu yang sering kali menjadi kendala karena adanya berbagai keterbatasan kemampuan dan ketersediaan uang/dana/anggaran yang dimiliki/ dikelola Pemerintah Daerah.

Sementara ini, dalam penyusunan anggaran belanja program/kegiatan melalui pendekatan sistem plafon ("*ceiling*") telah turut menyulitkan satuan-satuan organisasi menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya, oleh sebab tantangan ke depan dituntut lebih banyak kreatifitas dalam upaya melaksanakan TUPOKSI yang berujung pada pelayanan masyarakat dalam muwujudkan transportasi yang dicita-citakan bersama.

Demi memudahkan pemaknaan, penyusunan rencana kerja ini akhirnya dibuat dengan lebih banyak memanfaatkan tupoksi organisasi, disamping berbagai data sekunder yang tersedia, dan juga melalui literatur-literatur yang mendukung pengayaan substansi rencana kerja ini.

Selain itu dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat penyesuaian Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang ada di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota,

selanjutnya karena Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, agar Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, dapat diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, perlu segera penyesuaian peraturan perundangan yang mengatur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi yang telah mempedomani Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini penting agar perangkat daerah melaksanakan program/ kegiatan yang telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta ketepatan dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada butir 7, a. disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota harus menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/ susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. Hasil inventarisasi tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota T.A. 2017. Dengan demikian tahun 2017 harus telah mengimplementasikan UU. No. 23 Tahun 2014 baik dari sisi urusan, organisasi dan penganggarannya. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 harus telah mempertimbangkan urusan atau kewenangan bidang Perhubungan yang akan menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan urusan bidang Perhubungan Pemerintah Provinsi yang mana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, serta juga harus tetap mempertimbangkan kesinambungan keberlanjutan seuatu program/kegiatan dalam pencapaian RPJMD 2013-2018, RPJPD dan Dokumen Perencanaan lainnya.

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan rencana kerja tahun 2017 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena untuk menyempurnakan penyusunan program kegiatan tahun berikutnya, maka kami sangat mengharapkan segenap masukan dan sumbang saran yang konstruktif demi penyempurnaannya dan semoga bermanfaat dalam menunjang program kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan penyusunan Rencana Kerja.

LAMPIRAN

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT S/D TAHUN 2017

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keg	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg Tahun 2015			Target Program & Keg (Renja SKPD thn 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2016)	
					Target Renja SKPD tahun 2015	Realisasi Renja SKPD thn 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg s/d thn berjalan (2016)	Realisasi Capaian Program dan Keg s/d thn berjalan 2016
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10 = 5+7+9*	*11=10/4*
	Urusan Wajib									
	Bidang Urusan Perhubungan									
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	80%	17.02%	25.90%	19.06%	73.59%	39.77%	39.77%	49.7%
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi	100%	79.25%	87.55%	88.11%	100.64%	91.70%	91.70%	91.7%
3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tingkat Penurunan pelanggaran muatan lebih	93.989	283,820	153,045	262,552	58.29%	130,088	130,088	72.3%
4	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor	100%	47.50%	57.50%	65.00%	113.04%	67.50%	67.50%	67.5%
5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru	78.20%	11.94%	22.0%	22.01%	100.05%	*57%*	57.00%	72.9%
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan	100%	47.37%	56.0%	58.98%	105.32%	67%	67.00%	67.0%
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat	1146,142	1135.442	*1135.442*	*1135.442*	100.00%	*1135.442*	1135.442	99.1%

Formulir J-2: Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

NO		INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
					(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Sesuai Permenhub No. kM 81 Tahun 2011											
1	**Angkutan Jalan**												
	a	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	100%		79.25	87.55	91.70	95.85	79.25	88.11	91.70	95.85	
	b	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	c	Fasilitas Perlengkapan Jalan	60%		17.00	19.00	21.00	23.00	17.02	19.06	21.00	23.00	
	d	Keselamatan	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	e	Sumber Daya Manusia	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2	**Angkutan Sungai dan Danau**												
	a.	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	75%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	b.	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	60%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	c.	Keselamatan	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	d.	Sumber Daya Manusia (SDM)	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	**Angkutan Penyeberangan**												
	a.	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	75%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	b.	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	75%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	c.	Keselamatan	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	d.	Sumber Daya Manusia (SDM)	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	**Angkutan Laut**												
	a.	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	b.	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	c.	Keselamatan	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	d.	Sumber Daya Manusia (SDM)	100%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Catatan : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Bidang Perhubungan masuk dalam Urusan Wajib tetapi tidak masuk dalam pelayanan dasar

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT S/D TAHUN 2017

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keg	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg Tahun 2014			Target Program & Keg (Renja SKPD thn 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2016)	
					Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg s/d thn berjalan (2016)	Realisasi Capaian Program dan Keg s/d thn berjalan 2016
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10 = 5+7+9*	*11=10/4*
	Urusan Wajib									
	Bidang Urusan Perhubungan									
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase Jaringan Trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat	51	na	na	na	na	na	na	na
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	77,77	33.33	44.44%	44.44%	100.00%	55.56%	59.26%	106.7%
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum	100	*0.22*	25.17%	21.80%	86.61%	*50%*	*75%*	149.6%
4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase ketersediaan terminal Type B yang memenuhi standar	20	na	na	na	na	na	na	na
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan	49	na	na	na	na	na	na	na
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan Pengembangan Bandara Nusawiru)	49.87	11.34	23.39%	22.01%	94.10%	45.64%	51.90%	113.7%
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	84.57	51.5	60.61%	58.98%	97.31%	66.67%	69.69%	104.5%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Keg	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg Tahun 2014			Target Program & Keg (Renja SKPD thn 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2016)	
					Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg s/d thn berjalan (2016)	Realisasi Capaian Program dan Keg s/d thn berjalan 2016
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10 = 5+7+9*	*11=10/4*
8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi)	95.65	72.83	73.56%	72.83%	99.01%	74.29%	72.83%	98.0%
9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi	22.5	17	19.00%	19.06%	100.32%	21.00%	20.03%	95.4%

Formulir J-2: Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT

NO	INDIKATOR	Target	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2014 (n-2)	2015 (n-1)	2016 (n)	2017 (n+1)	2014 (n-2)	2015 (n-1)	2016 (n)	2017 (n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Prosentase Jaringan Trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat	51%		na	na	na	na	na	na	na	na	
2	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	77.77%		33%	44.44%	55.56%	66.67%	33.33%	44.44%	59.26%	66.67%	
3	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum	100%		*0%*	25.17%	50.12%	75.06%	0.23%	21.80%	75.00%	97%	
4	Prosentase ketersediaan terminal Type B yang memenuhi standar	20%		na	na	na	na	na	na	na	na	
5	Prosentase Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan	49%		na	na	na	na	na	na	na	na	
6	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan Pengembangan Bandara Nusawiru)	49.87%		11.34%	23.39%	45.64%	70.32%	11.94%	22.01%	51.90%	70,32%	
7	Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	84.57%		51.50%	60.61%	66.67%	72.73%	54.55%	58.98%	69.69%	72.73%	
8	Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi)	95.65%		72.83%	73.56%	74.29%	75.03%	72.83%	72.83%	72.83%	75.03%	
9	Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi	22.50%		17%	19.00%	21%	23%	17.02%	19.06%	20.03%	23%	

Tabel J-3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (Proses Penyesuaian)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				JUMLAH KEBUTUHAN PAGU		74,421,750,000				JUMLAH KEBUTUHAN PAGU		74,421,750,000	
14		**Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**				85,000,000		**Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**				85,000,000	
	1	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rancangan Dokumen Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Transportasi	Jawa Barat	1 Dokumen	85,000,000	1	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rancangan Dokumen Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Transportasi	Jawa Barat	1 Dokumen	85,000,000	
29		**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemabngunan Daerah**				376,715,000		**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemabngunan Daerah**				376,715,000	
	2	Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terselenggaranya penyusunan Renja SKPD, Forum SKPD dan Evaluasi dan Moitoring Kegiatan Dishub Jabar	Bandung, Jawa Barat	3 Dokumen	250,000,000	2	Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terselenggaranya penyusunan Renja SKPD, Forum SKPD dan Evaluasi dan Moitoring Kegiatan Dishub Jabar	Bandung, Jawa Barat	3 Dokumen	250,000,000	
	3	Verifikasi/ Monitoring Bantuan Gubernur/ Hibah/ Bidang Perhubungan	Laporan Hasil Verifikasi / Monitoring dan Evaluasi usulan hibah atau bantuan keuangan	Bandung, Jawa Barat	1 (satu) Dokumen	126,715,000	3	Verifikasi/ Monitoring Bantuan Gubernur/ Hibah/ Bidang Perhubungan	Laporan Hasil Verifikasi / Monitoring dan Evaluasi usulan hibah atau bantuan keuangan	Bandung, Jawa Barat	1 (satu) Dokumen	126,715,000	
48		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				10,948,000,000		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				10,948,000,000	
	4	Sinergitas Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat	Tersusunnya dokumen kesepakatan atau dokumen yang diperlukan lainnya untuk reaktivasi dan pembangunan Banjar - Cijulang, Bandung - Ciwidey dan lokasi lainnya yang diperlukan	Jawa Barat	percepatan perencanaan, pembangunan dan reaktivasi perkeretaapian di Jawa Barat	100,000,000	4	Sinergitas Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat	Tersusunnya dokumen kesepakatan atau dokumen yang diperlukan lainnya untuk reaktivasi dan pembangunan Banjar - Cijulang, Bandung - Ciwidey dan lokasi lainnya yang diperlukan	Jawa Barat	percepatan perencanaan, pembangunan dan reaktivasi perkeretaapian di Jawa Barat	100,000,000	
	5	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyebrangan dan ASDP di Jawa Barat	Pelabuhan di Wilayah Kerja Waduk Cirata dan di Wilayah Kerja Waduk Saguling	Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, kalipucang/ Majingklak, Waduk Saguling	1 kegiatan	2,750,000,000	5	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyebrangan dan ASDP di Jawa Barat	Pelabuhan di Wilayah Kerja Waduk Cirata dan di Wilayah Kerja Waduk Saguling	Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, kalipucang/ Majingklak, Waduk Saguling	1 kegiatan	2,750,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (Proses Penyesuaian)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	6	Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dukungan pembangunan pelabuhan laut di Jawa Barat (Bagian Utara dan Selatan)	Jawa Barat Bagian Utara dan Selatan	3 (tiga) Perjanjian Kerjasama pelabuhan laut di Jawa Barat dan 2 (dua) penetapan lokasi pelabuhan	150,000,000	6	Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dukungan pembangunan pelabuhan laut di Jawa Barat (Bagian Utara dan Selatan)	Jawa Barat Bagian Utara dan Selatan	3 (tiga) Perjanjian Kerjasama pelabuhan laut di Jawa Barat dan 2 (dua) penetapan lokasi pelabuhan	150,000,000	
	7	Penyusun DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata	Terlaksananya kegiatan penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata	Cipariuk, Galumpit, Plumbon (Kab. Purwakarta) dan Cibogo (Kab. Bandung Barat)	1 Dokumen (Laporan pendahuluan, antara, akhir dan gambar teknis)	750,000,000	7	Penyusun DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata	Terlaksananya kegiatan penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata	Cipariuk, Galumpit, Plumbon (Kab. Purwakarta) dan Cibogo (Kab. Bandung Barat)	1 Dokumen (Laporan pendahuluan, antara, akhir dan gambar teknis)	750,000,000	
	8	Penyusunan AMDAL Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kab Sukabumi	Tersusunnya AMDAL Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kab Sukabumi	Kab. Sukabumi	Rekomendasi AMDAL dari Komisi Amdal Provinsi	750,000,000	8	Penyusunan AMDAL Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kab Sukabumi	Tersusunnya AMDAL Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kab Sukabumi	Kab. Sukabumi	Rekomendasi AMDAL dari Komisi Amdal Provinsi	750,000,000	
	9	Penyusunan DLKr DLKp Pel Laut di Bojongsalawe Kab Pangandaran	Tersusunnya Dokumen DLKr dan DLKp Pelabuhan Laut di Bojongsalawe Kab Pangandaran	Bojongsalawe Kab Pangandaran	1 Dokumen (Laporan pendahuluan, antara, akhir dan gambar teknis)	600,000,000	9	Penyusunan DLKr DLKp Pel Laut di Bojongsalawe Kab Pangandaran	Tersusunnya Dokumen DLKr dan DLKp Pelabuhan Laut di Bojongsalawe Kab Pangandaran	Bojongsalawe Kab Pangandaran	1 Dokumen (Laporan pendahuluan, antara, akhir dan gambar teknis)	600,000,000	
	10	CLTH - Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat	Terlaksananya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat	Jawa Barat	Laporan	448,000,000	10	CLTH - Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat	Terlaksananya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat	Jawa Barat	Laporan	448,000,000	
	11	Fasilitasi Penertiban lahan Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek Tanjungsari	Tersusunnya kajian penanganan dampak sosial dan terlaksananya persiapan pembebasan lahan	Kab. Bandung, Kab. Sumedang	1 dokumen dan 1 kegiatan	400,000,000	11	Fasilitasi Penertiban lahan Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek Tanjungsari	Tersusunnya kajian penanganan dampak sosial dan terlaksananya persiapan pembebasan lahan	Kab. Bandung, Kab. Sumedang	1 dokumen dan 1 kegiatan	400,000,000	
	12	Proses Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai Bandara Nusawiru	Belanja sertifikat dan Biaya Lainnya; Belanja Pajak Bumi Bangunan Bandara Nusawiru	Nusawiru Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	300,000,000	12	Proses Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai Bandara Nusawiru	Belanja sertifikat dan Biaya Lainnya; Belanja Pajak Bumi Bangunan Bandara Nusawiru	Nusawiru Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	300,000,000	
	13	Proses sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai BIJB	Belanja Pengukuran, Sertifikasi, Balik Nama, Operasional pihak Ke-III dan biaya lainnya	Kertajati Kab. Majalengka	1 kegiatan	300,000,000	13	Proses sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai BIJB	Belanja Pengukuran, Sertifikasi, Balik Nama, Operasional pihak Ke-III dan biaya lainnya	Kertajati Kab. Majalengka	1 kegiatan	300,000,000	
	14	Pembangunan TaxyWay dan Appron (Lanjutan)	Pembangunan TaxyWay dan Appron (Lanjutan)	Nusawiru Kab. Pangandaran	80%	2,500,000,000	14	Pembangunan TaxyWay dan Appron (Lanjutan)	Pembangunan TaxyWay dan Appron (Lanjutan)	Nusawiru Kab. Pangandaran	80%	2,500,000,000	
	15	BIJB Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati	Tersusunnya 1 (satu) buah dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan BIJB Kertajati	Kabupaten Majalengka	Dokumen pemantauan lingkungan BIJB Kertajati Majalengka	750,000,000	15	BIJB Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati	Tersusunnya 1 (satu) buah dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan BIJB Kertajati	Kabupaten Majalengka	Dokumen pemantauan lingkungan BIJB Kertajati Majalengka	750,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (Proses Penyesuaian)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	16	Sinegritas pembangunan dan pengembangan bandar udara di Jawa Barat	Terlaksananya fasilitasi dan pengkoordinasian pembangunan BIJB Kertajati Majalengka dan Bandar Udara milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	1 Dokumen	150,000,000	16	Sinegritas pembangunan dan pengembangan bandar udara di Jawa Barat	Terlaksananya fasilitasi dan pengkoordinasian pembangunan BIJB Kertajati Majalengka dan Bandar Udara milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	1 Dokumen	150,000,000	
	17	CLTH - Penyusunan Dokumen Master Plan Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi	Tersusunya 1 (satu) buah dokumen Master Plan (Rencana Induk) Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	1 (satu) buah dokumen Master Plan (Rencana Induk) Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi	1,000,000,000	17	CLTH - Penyusunan Dokumen Master Plan Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi	Tersusunya 1 (satu) buah dokumen Master Plan (Rencana Induk) Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	1 (satu) buah dokumen Master Plan (Rencana Induk) Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi	1,000,000,000	
49	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)					21,000,000,000	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)					21,000,000,000	
	18	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah UPTD I Bogor	Kab dan Kota Bogor; Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab. Cianjur, Kab dan Kota Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Purwakarta	1 Kegiatan	7,500,000,000	18	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah UPTD I Bogor	Kab dan Kota Bogor; Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab. Cianjur, Kab dan Kota Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Purwakarta	1 Kegiatan	7,500,000,000	
	19	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah UPTD II Cirebon Priangan	Cirebon-Priangan	750 unit	7,500,000,000	19	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah UPTD II Cirebon Priangan	Cirebon-Priangan	750 unit	7,500,000,000	
	20	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Wilayah Metropolitan Bandung	Terlaksananya kegiatan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Wilayah Metropolitan Bandung	Metropolitan Bandung	1 kegiatan	4,000,000,000	20	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Wilayah Metropolitan Bandung	Terlaksananya kegiatan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Wilayah Metropolitan Bandung	Metropolitan Bandung	1 kegiatan	4,000,000,000	
	21	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	2,000,000,000	21	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	2,000,000,000	
50	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					10,458,400,000	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					10,458,400,000	
	22	Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV	Jawa Barat	42 unit	1,146,600,000	22	Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV	Jawa Barat	42 unit	1,146,600,000	
	23	Rehabilitasi Terminal Penumpang Umum Tipe B	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Terminal Penumpang Umum Tipe B	Jawa Barat	10 Terminal	7,500,000,000	23	Rehabilitasi Terminal Penumpang Umum Tipe B	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Terminal Penumpang Umum Tipe B	Jawa Barat	10 Terminal	7,500,000,000	
	24	DED Rehabilitasi Terminal Tipe B	Terlaksananya kegiatan DED Rehabilitasi Terminal Tipe B	Jawa Barat	1 Dokumen DED Rehabilitasi Terminal Tipe B	611,800,000	24	DED Rehabilitasi Terminal Tipe B	Terlaksananya kegiatan DED Rehabilitasi Terminal Tipe B	Jawa Barat	1 Dokumen DED Rehabilitasi Terminal Tipe B	611,800,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (Proses Penyesuaian)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	25	Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	300,000,000	25	Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	300,000,000	
	26	Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	200,000,000	26	Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	200,000,000	
	27	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	Terlaksananya kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	Jawa Barat	2 kegiatan	300,000,000	27	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	Terlaksananya kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	Jawa Barat	2 kegiatan	300,000,000	
	28	Penyusunan Sistem Informasi manajemen dan database angkutan umum Jawa Barat	Tersusunnya Sistem Informasi manajemen dan database angkutan umum Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	400,000,000	28	Penyusunan Sistem Informasi manajemen dan database angkutan umum Jawa Barat	Tersusunnya Sistem Informasi manajemen dan database angkutan umum Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	400,000,000	
51	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					3,679,000,000	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					3,679,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (Proses Penyesuaian)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	29 Penyelenggaraan lalu lintas angkutan lebaran Natal dan Tahun Baru	tersusunya Rencana Operasi; terselenggaranya Rapat koordinasi 4 kali; terselenggaranya angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru; tersusunnya dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan; terselenggaranya pelaksanaan poskoda, poskotis, posko pasar tumpah; terselenggaranya evaluasi dan pelaporan	Jawa Barat	Poskoda Dishub Provinsi Jabar, Poskotis/Pasar Tumpah 40 lokasi, pencacah arus 8 lokasi, sewa bus 1 kegiatan dan 2 (dua) kegiatan hasil pencacahan arus lalu lintas angkutan lebaran, natal dan tahun baru; cek pointkelayakan kendaraan dan kesehatan pengemudi pada arus mudik dan balik angkutan lebaran Tahun 2017 (1437H); belanja fas lalin berupa RPPJ Portable 10 buah, traffic cone 700 buah, water barier 125 buah, stick lamp 500 buah dan rompi pengatur check	2,679,000,000	29 Penyelenggaraan lalu lintas angkutan lebaran Natal dan Tahun Baru	tersusunya Rencana Operasi; terselenggaranya Rapat koordinasi 4 kali; terselenggaranya angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru; tersusunnya dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan; terselenggaranya pelaksanaan poskoda, poskotis, posko pasar tumpah; terselenggaranya evaluasi dan pelaporan	Jawa Barat	Poskoda Dishub Provinsi Jabar, Poskotis/Pasar Tumpah 40 lokasi, pencacah arus 8 lokasi, sewa bus 1 kegiatan dan 2 (dua) kegiatan hasil pencacahan arus lalu lintas angkutan lebaran, natal dan tahun baru; cek pointkelayakan kendaraan dan kesehatan pengemudi pada arus mudik dan balik angkutan lebaran Tahun 2017 (1437H); belanja fas lalin berupa RPPJ Portable 10 buah, traffic cone 700 buah, water barier 125 buah, stick lamp 500	2,679,000,000	
	30 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat	Terlaksananya pengendalian dan pengamanan sarana dan prasarana perhubungan melalui; 1) penghonoran TNI/POLRI dan Dishub Kabupaten/Kota dalam Tim Gabungan, Pengamanan Portal dan penempatan TNI, POLRI di Jembatan Timbang; 2) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Transportasi Darat	Provinsi Jawa Barat	1 (satu) kegiatan	1,000,000,000	30 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat	Terlaksananya pengendalian dan pengamanan sarana dan prasarana perhubungan melalui; 1) penghonoran TNI/POLRI dan Dishub Kabupaten/Kota dalam Tim Gabungan, Pengamanan Portal dan penempatan TNI, POLRI di Jembatan Timbang; 2) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Transportasi Darat	Provinsi Jawa Barat	1 (satu) kegiatan	1,000,000,000	
59	**Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur**				**1,669,030,000**	**Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur**				**1,669,030,000**	
	31 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Terselenggaranya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur di Kantor Dishub Jabar	Bandung, Jawa Barat	sebanyak 370 pegawai dalam rangka peningkatan sumber daya	1,669,030,000	31 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Terselenggaranya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur di Kantor Dishub Jabar	Bandung, Jawa Barat	sebanyak 370 pegawai dalam rangka peningkatan sumber daya	1,669,030,000	
60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**6,854,053,000**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**6,854,053,000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (Proses Penyesuaian)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	32	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP	Peningkatan / pengadaan sarana dan prasarana kantor balai pengelolaan pelabuhan laut ASDP Guna menunjang tugas operasional		1 Tahun	1,000,000,000	32	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP	Peningkatan / pengadaan sarana dan prasarana kantor balai pengelolaan pelabuhan laut ASDP Guna menunjang tugas operasional		1 Tahun	1,000,000,000	
	33	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara	Terselenggaranya administrasi perkantoran di Balai Pengelolaan Bandar Udara, Bandara Nusawiru dan BIJB	Balai BPBU, Nusawiru dan Kertajati	12 bulan	800,000,000	33	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara	Terselenggaranya administrasi perkantoran di Balai Pengelolaan Bandar Udara, Bandara Nusawiru dan BIJB	Balai BPBU, Nusawiru dan Kertajati	12 bulan	800,000,000	
	34	Penyelenggaraan administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	Bandung, Jawa Barat	1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan administrasi	3,000,000,000	34	Penyelenggaraan administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	Bandung, Jawa Barat	1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan administrasi	3,000,000,000	
	35	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Terlaksananya operasional kantor	Cirebon-Priangan	1 (satu) tahun anggaran	1,028,336,000	35	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Terlaksananya operasional kantor	Cirebon-Priangan	1 (satu) tahun anggaran	1,028,336,000	
	36	Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	Terlaksananya operasional kantor		1 Tahun	1,025,717,000	36	Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	Terlaksananya operasional kantor		1 Tahun	1,025,717,000	
61	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**11,878,100,000**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					**11,878,100,000**	
	37	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 (satu) Tahun Anggaran 2017	Kantor BPPLASDP, Majingklak, Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, kebon coklat	1 kegiatan	1,000,000,000	37	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 (satu) Tahun Anggaran 2017	Kantor BPPLASDP, Majingklak, Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, kebon coklat	1 kegiatan	1,000,000,000	
	38	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 (satu) Tahun Anggaran 2017	Bogor, Cianjur, Purwakarta dan Karawang	1 (satu) Tahun	1,000,000,000	38	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 (satu) Tahun Anggaran 2017	Bogor, Cianjur, Purwakarta dan Karawang	1 (satu) Tahun	1,000,000,000	
	39	Revitalisasi Tahap V Balai Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBU dan Bandara Nusawiru	Nusawiru Kab. Pangandaran	1 kegiatan	1,000,000,000	39	Revitalisasi Tahap V Balai Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBU dan Bandara Nusawiru	Nusawiru Kab. Pangandaran	1 kegiatan	1,000,000,000	
	40	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dishub Jabar	Tersedianya sarana dan prasarana kantor Dishub Jabar TA. 2017	Bandung, Jawa Barat	1 (satu) Tahun Anggaran	3,000,000,000	40	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dishub Jabar	Tersedianya sarana dan prasarana kantor Dishub Jabar TA. 2017	Bandung, Jawa Barat	1 (satu) Tahun Anggaran	3,000,000,000	
	41	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Terpenuhinya fasilitas kantor UPTD lalu lintas dan angkutan jalan wilayah II Cirebon-Priangan dan 4 (empat) Jembatan Timbang selama 1 (satu) tahun anggaran 2017	Cirebon-Priangan	1 (satu) Tahun Anggaran	878,100,000	41	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Terpenuhinya fasilitas kantor UPTD lalu lintas dan angkutan jalan wilayah II Cirebon-Priangan dan 4 (empat) Jembatan Timbang selama 1 (satu) tahun anggaran 2017	Cirebon-Priangan	1 (satu) Tahun Anggaran	878,100,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (Proses Penyesuaian)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	42	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Terminal Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Pengadaan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B di Jawa Barat	Jawa Barat	Pengadaan prasarana kantor Terminal dan kendaraan roda 2 = 50 unit	5,000,000,000	42	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Terminal Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Pengadaan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B di Jawa Barat	Jawa Barat	Pengadaan prasarana kantor Terminal dan kendaraan roda 2 = 50 unit	5,000,000,000	
62	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					**7,043,250,000**	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					**7,043,250,000**	
	43	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Balai PPLASDP	Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manuasia, Dana Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP Tahun anggaran 2017		1 Tahun	1,200,000,000	43	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Balai PPLASDP	Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manuasia, Dana Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP Tahun anggaran 2017		1 Tahun	1,200,000,000	
	44	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengelolaan Bandar Udara	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	Balai BPBU, Bandara Nusawiru	1 Tahun	882,950,000	44	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengelolaan Bandar Udara	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	Balai BPBU, Bandara Nusawiru	1 Tahun	882,950,000	
	45	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dishub Jabar	Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manuasia, Dana Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat		1 (satu) tahun anggaran	3,500,000,000	45	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dishub Jabar	Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manuasia, Dana Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat		1 (satu) tahun anggaran	3,500,000,000	
	46	Pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan Tahun Anggaran 2017	Cirebon-Priangan	1 (satu) tahun anggaran	710,300,000	46	Pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan Tahun Anggaran 2017	Cirebon-Priangan	1 (satu) tahun anggaran	710,300,000	
	47	Pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor Purwakarta Tahun Anggaran 2017		1 Tahun	750,000,000	47	Pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor Purwakarta Tahun Anggaran 2017		1 Tahun	750,000,000	
65	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah					**100,000,000**	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah					**100,000,000**	
	48	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Dishub Jabar	Terlaksananya pelaporan keuangan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) untuk mempertahankan opini WTP dari BPK - RI	Jawa Barat	Dokumen laporan keuangan	100,000,000	48	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Dishub Jabar	Terlaksananya pelaporan keuangan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) untuk mempertahankan opini WTP dari BPK - RI	Jawa Barat	Dokumen laporan keuangan	100,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (Proses Penyesuaian)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				**180,202,000**		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				**180,202,000**	
	49	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Fixed Cost)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan program, evaluasi kegiatan Dishub Jabar	Bandung, Jawa Barat	1 Tahun	180,202,000	49	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Fixed Cost)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan program, evaluasi kegiatan Dishub Jabar	Bandung, Jawa Barat	1 Tahun	180,202,000	
79		Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah				**150,000,000**		Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah				**150,000,000**	
	50	Peningkatan Sistem Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan website di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Bandung, Jawa Barat	1 Tahun	150,000,000	50	Peningkatan Sistem Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan website di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Bandung, Jawa Barat	1 Tahun	150,000,000	

Tabel J-4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
					JUMLAH KEBUTUHAN PAGU	74,421,750,000			81,863,925,000
14		**Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**				85,000,000			93,500,000
	1	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rancangan Dokumen Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Transportasi	Jawa Barat	1 Dokumen	85,000,000	APBD Provinsi	Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	93,500,000
29		**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemabngunan Daerah**				376,715,000			414,386,500
	2	Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terselenggaranya penyusunan Renja SKPD, Forum SKPD dan Evaluasi dan Moitoring Kegiatan Dishub Jabar	Bandung, Jawa Barat	3 Dokumen	250,000,000	APBD Provinsi	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah : spasial dan sektoral	275,000,000
	3	Verifikasi/ Monitoring Bantuan Gubernur/ Hibah/ Bidang Perhubungan	Laporan Hasil Verifikasi / Monitoring dan Evaluasi usulan hibah atau bantuan keuangan	Bandung, Jawa Barat	1 (satu) Dokumen	126,715,000	APBD Provinsi	Tingkat Kesesuaian pelaporan Kinerja sesuai dengan standar akuntansi	139,386,500
48		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				10,948,000,000			12,042,800,000
	4	Sinergitas Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat	Tersusunnya dokumen kesepakatan atau dokumen yang diperlukan lainnya untuk reaktivasi dan pembangunan Banjar - Cijulang, Bandung - Ciwidey dan lokasi lainnya yang diperlukan	Jawa Barat	percepatan perencanaan, pembangunan dan reaktivasi perkeretaapian di Jawa Barat	100,000,000	APBD Provinsi	Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi)	110,000,000

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	5	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyebrangan dan ASDP di Jawa Barat	Pelabuhan di Wilayah Kerja Waduk Cirata dan di Wilayah Kerja Waduk Saguling	Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, kalipucang/Majingklak, Waduk Saguling	1 kegiatan	2,750,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen perencanaan laut dan ASDP, Pembebasan lahan pelabuhan laut pengumpan regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	3,025,000,000
	6	Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dukungan pembangunan pelabuhan laut di Jawa Barat (Bagian Utara dan Selatan)	Jawa Barat Bagian Utara dan Selatan	3 (tiga) Perjanjian Kerjasama pelabuhan laut di Jawa Barat dan 2 (dua) penetapan lokasi pelabuhan	150,000,000		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen perencanaan laut dan ASDP, Pembebasan lahan pelabuhan laut pengumpan regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	165,000,000
	7	Penyusun DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata	Terlaksananya kegiatan penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata	Cipariuk, Galumpit, Plumbon (Kab. Purwakarta) dan Cibogo (Kab. Bandung Barat)	1 Dokumen (Laporan pendahuluan, antara, akhir dan gambar teknis)	750,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen perencanaan laut dan ASDP, Pembebasan lahan pelabuhan laut pengumpan regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	825,000,000
	8	Penyusunan AMDAL Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kab Sukabumi	Tersusunnya AMDAL Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kab Sukabumi	Kab. Sukabumi	Rekomendasi AMDAL dari Komisi Amdal Provinsi	750,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen perencanaan laut dan ASDP, Pembebasan lahan pelabuhan laut pengumpan regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	825,000,000

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	9	Penyusunan DED Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kab Sukabumi	Terlaksananya kegiatan penyusunan DED Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kab. Sukabumi	Ciletuh Kab. Sukabumi	1 Dokumen (Laporan pendahuluan, antara, akhir dan gambar teknis)	-	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen perencanaan laut dan ASDP, Pembebasan lahan pelabuhan laut pengumpan regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	-
	10	Penyusunan DLKr DLKp Pel Laut di Bojongsalawe Kab Pangandaran	Tersusunnya Dokumen DLKr dan DLKp Pelabuhan Laut di Bojongsalawe Kab Pangandaran	Bojongsalawe Kab Pangandaran	1 Dokumen (Laporan pendahuluan, antara, akhir dan gambar teknis)	600,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen perencanaan laut dan ASDP, Pembebasan lahan pelabuhan laut pengumpan regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	660,000,000
	11	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Angkutan Danau di Waduk Jatigede	Tersusunnya Dokumen Rencana induk pelabuhan ASDP di Waduk Jatigede	Waduk Jatigede	1 Dokumen (Laporan pendahuluan, antara, akhir dan gambar teknis)	-	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen perencanaan laut dan ASDP, Pembebasan lahan pelabuhan laut pengumpan regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	-
	12	CLTH - Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat	Terlaksananya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat	Jawa Barat	Laporan	448,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen perencanaan laut dan ASDP, Pembebasan lahan pelabuhan laut pengumpan regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	492,800,000

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	13	Pengendalian Pengawasan dan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di Provinsi Jawa Barat	Menekan angka kecelakaan pelayaran dan pelanggaran di perairan Jawa Barat	Kab. Ciamis, Indramayu, Pamanukan dan Palabuhan ratu, Cianjur, Purwakarta, Bnadung Barat	Pengendalian, pengawasan dan sosialisasi keselamatan pelayaran adalah agar para operator kapal terampil dan mengerti arti penting keselamatan pelayaran sesuai peraturan	-	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen perencanaan laut dan ASDP, Pembebasan lahan pelabuhan laut pengumpan regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	-
	14	Fasilitasi Penertiban lahan Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek Tanjungsari	Tersusunnya kajian penanganan dampak sosial dan terlaksananya persiapan pembebasan lahan	Kab. Bandung, Kab. Sumedang	1 dokumen dan 1 kegiatan	400,000,000	APBD Provinsi	Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi)	440,000,000
	15	BIJB Pembangunan Pagar BIJB di Kertajati (Lanjutan)	Pembangunan Pagar Bandara sepanjang 9 KM	Kertajati Kab. Majalengka	Pembangunan Pagar Bandara sepanjang 9 KM dari Target total 50 KM	-	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	-
	16	BIJB Pengamanan Aset Lahan BIJB di Kertajati	Pengamananan Aset Lahan untuk BIJB	Kertajati Kab. Majalengka	60 orang	-	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	-

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	17	Proses Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai Bandara Nusawiru	Belanja sertifikat dan Biaya Lainnya; Belanja Pajak Bumi Bangunan Bandara Nusawiru	Nusawiru Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	300,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	330,000,000
	18	Pembangunan Gedung Display BIJB di Kertajati (Tahap II)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Display BIJB di Kertajati	Kertajati Kab. Majalengka	1 unit Gedung Display BIJB di Kertajati Majalengka Tahap II	-	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	-
	19	Proses sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai BIJB	Belanja Pengukuran, Sertifikasi, Balik Nama, Operasional pihak Ke-III dan biaya lainnya	Kertajati Kab. Majalengka	1 kegiatan	300,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	330,000,000
	20	Pembangunan Pagar Bandara Nusawiru (Lanjutan)	Pembangunan Pagar Bandara Nusawiru sepanjang 5 KM	Nusawiru Kab. Pangandaran	Pembangunan Pagar sepanjang 5 Km	-	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	-
	21	Pembangunan TaxyWay dan Appron (Lanjutan)	Pembangunan TaxyWay dan Appron (Lanjutan)	Nusawiru Kab. Pangandaran	80%	2,500,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	2,750,000,000

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	22	BIJB Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati	Tersusunnya 1 (satu) buah dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan BIJB Kertajati	Kabupaten Majalengka	Dokumen pemantauan lingkungan BIJB Kertajati Majalengka	750,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	825,000,000
	23	Sinegritas pembangunan dan pengembangan bandar udara di Jawa Barat	Terlaksananya fasilitasi dan pengkoordinasian pembangunan BIJB Kertajati Majalengka dan Bandar Udara milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	1 Dokumen	150,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	165,000,000
	24	Penyusunan Dokumen RTT Landasan Pacu di Wilayah Jabar Selatan	Tersusunya 1 (satu) buah dokumen RTT Landasan Pacu di Wilayah Jabar Selatan	Sukabumi, Garut, dan Cianjur	1 (satu) buah dokumen RTT Landasan Pacu di Wilayah Jabar Selatan	-	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	-
	25	CLTH - Penyusunan Dokumen Master Plan Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi	Tersusunya 1 (satu) buah dokumen Master Plan (Rencana Induk) Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	1 (satu) buah dokumen Master Plan (Rencana Induk) Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi	1,000,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru)	1,100,000,000
49	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)					21,000,000,000			23,100,000,000

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	26	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah UPTD I Bogor	Kab dan Kota Bogor; Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab. Cianjur, Kab dan Kota Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab.	1 Kegiatan	7,500,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	8,250,000,000
	27	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah UPTD II Cirebon Priangan	Cirebon-Priangan	750 unit	7,500,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	8,250,000,000
	28	Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Wilayah Metropolitan Bandung	Terlaksananya kegiatan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Wilayah Metropolitan Bandung	Metropolitan Bandung	1 kegiatan	4,000,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	4,400,000,000
	29	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	2,000,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	2,200,000,000
50		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				10,458,400,000			11,504,240,000
	30	Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV	Jawa Barat	42 unit	1,146,600,000	APBD Provinsi	Prosentase jaringan trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat	1,261,260,000
	31	Rehabilitasi Terminal Penumpang Umum Tipe B	Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Terminal Penumpang Umum Tipe B	Jawa Barat	10 Terminal	7,500,000,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar	8,250,000,000
	32	DED Rehabilitasi Terminal Tipe B	Terlaksananya kegiatan DED Rehabilitasi Terminal Tipe B	Jawa Barat	1 Dokumen DED Rehabilitasi Terminal Tipe B	611,800,000	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar	672,980,000
	33	Operasional Terminal Penumpang Umum Tipe B	Terlaksananya kegiatan untuk Operasional Terminal Penumpang Umum Tipe B	Jawa Barat	1 kegiatan	-	APBD Provinsi	Prosentase ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar	-

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	34	Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	300,000,000	APBD Provinsi	Prosentase jaringan trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat	330,000,000
	35	Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	200,000,000	APBD Provinsi	Prosentase jaringan trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat	220,000,000
	36	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	Terlaksananya kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	Jawa Barat	2 kegiatan	300,000,000	APBD Provinsi	Prosentase keikutsertaan Kabupaten/Kota dalam WTN	330,000,000
	37	Sosialisasi Keselamatan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keselamatan	Jawa Barat	1 kegiatan	-	APBD Provinsi	Prosentase jaringan trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat	-
	38	Penyusunan Sistem Informasi manajemen dan database angkutan umum Jawa Barat	Tersusunnya Sistem Informasi manajemen dan database angkutan umum Jawa Barat	Jawa Barat	1 kegiatan	400,000,000	APBD Provinsi	Prosentase jaringan trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat	440,000,000
51	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					3,679,000,000			4,046,900,000

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	39	Penyelenggaraan lalu lintas angkutan lebaran Natal dan Tahun Baru	tersusunya Rencana Operasi; terselenggaranya Rapat koordinasi 4 kali; terselenggaranya angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru; tersusunnya dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan; terselenggaranya pelaksanaan poskoda, poskotis, posko pasar tumpah; terselenggaranya evaluasi dan pelaporan	Jawa Barat	Poskoda Dishub Provinsi Jabar, Poskotis/Pasar Tumpah 40 lokasi, pencacah arus 8 lokasi, sewa bus 1 kegiatan dan 2 (dua) kegiatan hasil pencacahan arus lalu lintas angkutan lebaran, natal dan tahun baru; cek pointkelayakan kendaraan dan kesehatan pengemudi pada arus mudik dan balik angkutan lebaran Tahun 2017 (1437H); belanja fas lalin berupa RPPJ Portable 10 buah, traffic cone 700 buah, water barier 125 buah, stick	2,679,000,000	APBD Provinsi	Prosentase angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang Kartu Pengawasan	2,946,900,000
	40	Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat	Terlaksananya pengendalian dan pengamanan sarana dan prasarana perhubungan melalui; 1) penghonoran TNI/POLRI dan Dishub Kabupaten/Kota dalam Tim Gabungan, Pengamanan Portal dan penempatan TNI, POLRI di Jembatan Timbang; 2) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Transportasi Darat	Provinsi Jawa Barat	1 (satu) kegiatan	1,000,000,000	APBD Provinsi	Prosentase angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang Kartu Pengawasan	1,100,000,000
52		Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor				-			-
	41	Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat	Terlaksananya penyuluhan kepada Perusahaan Karoseri se-Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	120 orang perwakilan perusahaan karoseri	-		Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor	-

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Terselenggaranya rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten di Jawa Barat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	2 kali 75 orang perwakilan Dishub Kabupaten/Kota				
			Monitoring dan Evaluasi kelaikan kendaraan bermotor di Jawa Barat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	UPTD PKB di Jawa Barat				
			Terlaksananya supervisi dan koordinasi ke Dinas Perhubungan Kota/Kab se-Jawa Barat	Jawa Barat	Terlaksananya evaluasi dan penilaian sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 sertifikat Registrasi Uji tipe		APBD Provinsi		
			Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 pelayanan Sertifikat Registrasi Uji Tipe	Jawa Barat	1 sertifikat surveilanceISO 9001:2008		APBD Provinsi		
59	**Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur**					**1,669,030,000**			1,835,933,000
	42	Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Terselenggaranya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur di Kantor Dishub Jabar	Bandung, Jawa Barat	sebanyak 370 pegawai dalam rangka peningkatan sumber daya	1,669,030,000	APBD Provinsi	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1,835,933,000
60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					**6,854,053,000**			7,539,458,300
	43	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP	Peningkatan / pengadaan sarana dan prasarana kantor balai pengelolaan pelabuhan laut ASDP Guna menunjang		1 Tahun	1,000,000,000	APBD Provinsi	Terselenggaranya administrasi perkantoran	1,100,000,000
	44	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara	Terselenggaranya administrasi perkantoran di Balai Pengelolaan Bandar Udara, Bandara Nusawiru dan BIJB	Balai BPBU, Nusawiru dan Kertajati	12 bulan	800,000,000	APBD Provinsi	Terselenggaranya administrasi perkantoran	880,000,000
	45	Penyelenggaraan administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	Bandung, Jawa Barat	1 (satu) tahun anggaran dalam rangka menunjang kegiatan	3,000,000,000	APBD Provinsi	Terselenggaranya administrasi perkantoran	3,300,000,000
	46	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Terlaksananya operasional kantor	Cirebon-Priangan	1 (satu) tahun anggaran	1,028,336,000	APBD Provinsi	Terselenggaranya administrasi perkantoran	1,131,169,600

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	47	Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah I Bogor	Terlaksananya operasional kantor		1 Tahun	1,025,717,000	APBD Provinsi	Terselenggaranya administrasi perkantoran	1,128,288,700
61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**11,878,100,000**			13,065,910,000
	48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 (satu) Tahun Anggaran 2017	Kantor BPPLASDP, Majingklak,	1 kegiatan	1,000,000,000	APBD Provinsi	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1,100,000,000
	49	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 (satu) Tahun	Bogor, Cianjur, Purwakarta	1 (satu) Tahun	1,000,000,000		Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1,100,000,000
	50	Revitalisasi Tahap V Balai Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBU dan Bandara Nusawiru	Nusawiru Kab. Pangandaran	1 kegiatan	1,000,000,000	APBD Provinsi	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1,100,000,000
	51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dishub Jabar	Tersedianya sarana dan prasarana kantor Dishub Jabar TA. 2017	Bandung, Jawa Barat	1 (satu) Tahun Anggaran	3,000,000,000	APBD Provinsi	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	3,300,000,000
	52	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon	Terpenuhinya fasilitas kantor UPTD lalu lintas dan angkutan jalan wilayah II Cirebon-Priangan dan 4 (empat)	Cirebon-Priangan	1 (satu) Tahun Anggaran	878,100,000		Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	965,910,000
	53	Pengadaan Kendaraan Operasional Terminal Tipe B	Kendaraan Toyota Hilux dan Yamaha N-Max	Bandung, Jawa Barat	Toyota Hilux untuk pengujian = 8 unit, toyota Hilux	-	APBD Provinsi	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	-
	54	Pengadaan Kendaraan Operasional mobil derek untuk persiapan pengelolaan Terminal Tipe B	Kendaraan Derek	Jawa Barat	Mobil Derek Hino = 8 unit	-		Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	-
	55	Pengadaan Kendaraan Operasional untuk survey, monitoring dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	Mobil Crane dan Survey Pemeliharaan Fasilitas Llau Lintas	Jawa Barat	Mobil Crane = 2 unit ; Mobil survey = 2 unit	-		Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	-
	56	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Terminal Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Pengadaan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B di Jawa Barat	Jawa Barat	Pengadaan prasarana kantor Terminal dan kendaraan roda 2 = 50 unit	5,000,000,000		Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	5,500,000,000
62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur				**7,043,250,000**			7,747,575,000
	57	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Balai PPLASDP	Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manuasia, Dana Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana		1 Tahun	1,200,000,000		Prosentase sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD yang terpelihara sesuai standar baku pemeliharaan	1,320,000,000

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	58	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengelolaan Bandar Udara	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara	Balai BPBU, Bandara Nusawiru	1 Tahun	882,950,000	APBD Provinsi	Prosentase sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD yang terpelihara sesuai standar baku pemeliharaan	971,245,000